

KOMINKAN (公民館) **(Citizens Public Halls)**



Bagian I

Pendahuluan

Sebagaimana di Indonesia, Jepang juga mempunyai institusi pendidikan Non Formal yang terkait dengan pendidikan masyarakat yang tersebar diseluruh pelosok yang bisa dikatakan sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat atau Community Learning Centre (CLC) yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Di dalam bahasa Jepang “CLC” ini disebut KOMINKAN atau artinya “Citizens Public Hall”.

Sebagaimana artinya Kominkan ini mencerminkan kegiatan yang berasal dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang tumbuh dan berkembang dari dalam masyarakat ini pada dasarnya berkembang sesuai dengan tuntutan yang zaman ataupun perkembangan yang terjadi di dalam maupun dilingkungan masyarakat Jepang. Kegiatan KOMINKAN ini bukan berarti bahwa semuanya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah juga juga mempunyai peranan yang berbeda dari waktu ke waktu.

Pada saat ini di Jepang terdapat dua jenis KOMINKAN, dilihat dari manajemen/ pengelolaan kegiatannya, yaitu yang dikelola oleh pemerintah kota (municipalities) dan juga yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Secara umum di dalam segi pembiayaan kegiatan kominkan dapat dibiayai dari dana masyarakat dan juga melalui dana yang dibantu/diberikan pemerintah berdasarkan proposal yang diajukan, namun institusi tersebut tetap bersifat sebagai lembaga Non-Profit.

Fungsi Pusat pembelajaran masyarakat di dalam pengembangan masyarakat dan fungsi peningkatan pembelajaran sepanjang hayat menjadi semakin penting dalam masyarakat pembelajar, pengembangan perdamaian serta pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia dengan

bimbingan pemerintah serta bantuan dari instansi internasional seperti UNESCO, CLC atau lebih dikenal dengan PKBM telah berkembang dengan baik. Di Jepang perkembangan sejenis PKBM yang telah berlangsung selama kurang lebih 60 tahun, kaya akan akumulasi pengalaman dalam kebijakan, pengelolaan, implementasi serta pengembangan jejaring antar institusi sejenis.

Melalui program pertukaran Indonesia Jepang terkait dengan PKBM/Kominkan memberikan kesempatan untuk delegasi Indonesia melihat Kominkan di Jepang serta bertukar informasi dengan pengelola setempat guna pengembangan fungsi PKBM/CLC yang lebih besar bagi kedua negara dimasa mendatang.

Sejarah Kominkan

Kominkan di dalam bahasa Jepang berarti Pusat kegiatan Budaya Masyarakat. Kominkan di Jepang mulai subur bertumbuhan dari dalam masyarakat setelah kekalahan Jepang pada perang dunia II pada tahun 1945. Dari kondisi tersebut masyarakat Jepang yang memang dari akar budaya yang dimiliki pada dasarnya mempunyai nasionalisme yang tinggi dan saat itu merasa sangat memerlukan untuk menyatukan visi untuk membangun kembali negaranya, dimulai dengan pemberdayaan masyarakat. Hampir di setiap bagian kota dan desa berdiri organisasi masyarakat yang saat itu bertujuan membangun dan menyebarkan prinsip-prinsip demokrasi. Pertumbuhan organisasi masyarakat ini didukung oleh pemerintah pusat melalui pendanaan yang diberikan untuk pendiriannya serta Undang-undang Pendidikan Sosial pada tahun 1949/ "Social Education Act 1949" yang diakui sebagai bentuk sistem pendidikan untuk orang dewasa.

Kebutuhan pembangunan kembali memberikan kesadaran pada penduduk Jepang untuk mengembangkan pendidikan

bukan hanya untuk anak-anak namun juga pendidikan untuk orang dewasa. Karenanya pembangunan/pendirian Kominkan lalu dipromosikan pemerintah secara besar-besaran. Aktifitas kemasyarakatan ini dimulai tahun 1947, hanya setahun setelah kekalahan Jepang pada perang dunia kedua. Penggagas advokasi Kominkan ini adalah Teranaka Sakuo, dengan melakukan reformasi sistem pendidikan saat perang telah berakhir. Dia mengatakan, bahwa satu-satunya jalan bagi Jepang untuk kembali berdiri haruslah sebagai negara yang cinta damai dan berbudaya yang ditegakan melalui demokrasi.

Demokrasi ini bukanlah suatu yang dipaksakan oleh sekutu, namun merupakan kesadaran untuk ikut membangun perdamaian dan kebudayaan. Kominkan adalah tempat yang baik untuk mengembangkan kebudayaan dan meluaskan wawasan, mematangkan pemikiran yang memberikan layanan sebagai sebuah oasis bagi kehidupan. Hanya dalam beberapa tahun impian ini bisa diwujudkan diseluruh pelosok negara. Pada awalnya sangat banyak pemuda turut serta sebagai volunter dalam kegiatan ini dan menjadikan Kominkan sebagai institusi pendidikan sejalan dengan kegiatan sekolah-sekolah dasar dan menengah yang ada.

Kominkan menunjukan suatu aspek budaya dan lingkungan yang unik dari masyarakat Jepang selama lebih dari setengah abad serta mempunyai sifat universal dalam memenuhi kebutuhan esensial akan pembelajaran sepanjang hayat untuk kehidupan masyarakat serta harapan yang terus berkembang pada masa yang mendatang. Pada awalnya Kominkan dikelola oleh Badan Pendidikan Lokal yang terlepas dari bagian-bagian lain pada pemerintahan lokal. Kedudukannya sama seperti halnya museum atau perpustakaan umum, sebagai institusi pendidikan umum.

Namun demikian disamping organisasi yang dikelola pemerintah lokal terdapat juga Kominkan yang di bangun dan dikelola melalui spirit volunterisme yang bersifat mutual dari

masyarakat setempat. Bentuk ini menunjukkan bahwa di Jepang Kominkan tidak selalu harus berada dibawah administrasi kota/regional, melainkan juga bisa dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kominkan jenis ini biasanya mempunyai skala aktifitas yang lebih kecil serta biasa terdapat di pedesaan. Jenis ini biasa disebut sebagai “Autonomous Kominkan” atau “Village Kominkan”.

Spirit dari Autonomous Kominkan ini kebanyakan ditujukan untuk memperkuat solidaritas antara anggotanya disamping untuk memperbaiki lingkungan hidup mereka. Sebagian dari Kominkan jenis ini juga berkolaborasi dengan Kominkan yang dikelola oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian tahun 2002 jumlah Autonomous Kominkan ini mencapai 76.883. Pada perkembangan selanjutnya dimana banyak fasilitas publik dibangun diseluruh Jepang baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, maka terdapat pusat-pusat masyarakat yang tersebar merata dengan fungsi layanan kemasyarakatan, yang bukan hanya sekedar sebagai tempat pertemuan .

Respon masyarakat sangat tinggi terhadap aktifitas Kominkan. Ddalam waktu singkat kegiatan tersebut mampu membentuk gaya hidup yang baru pada masyarakat Jepang. Waktu berlalu, masyarakat Jepang berubah menjadi negara maju di dalam teknologi dan kembali mensejajarkan diri dengan negara industri terkemuka di dunia. Saat ini fungsi aktifitas dan image akan Kominkan menjadi ambiguous atau tidak jelas seperti dahulu awal berdirinya. Kedudukannya tetap berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Aktifitasnya saat ini diputuskan secara lokal dan sangat bervariasi. Tergantung pada kondisi lokal, mereka kebanyakan bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, menentukan sendiri tujuan dengan spirit ketidakbergantungan (pada pemerintah pusat) serta mempromosikan industri tradisional serta aktifitas budaya.

Peningkatan kesejahteraan di dalam masyarakat Jepang dan juga perubahan struktur keluarga di dalam masyarakat, menyebabkan perubahan di dalam fungsi kominkan. Kominkan yang sebelumnya memberikan pendidikan sosial politik pada masyarakat. Pada saat ini lebih bersifat sebagai institusi sosial yang berusaha membantu anggotanya untuk bisa keluar dari permasalahan sosial yang ada, khususnya masalah yang terkait dengan perhatian terhadap orang-orang tua dan keberadaan ibu muda beserta anaknya. Secara umum anggota masyarakat tersebut seperti terisolasi dari masyarakat aktif umumnya, sehingga bisa menyebabkan timbulnya tekanan pada kejiwaan yang bisa berakibat negatif di dalam kehidupan kesehari

BAGIAN II

Pendidikan Sosial dan KOMINKAN

A. Pendidikan sosial

Pendidikan di Jepang mengenal tiga sistem: home education (pendidikan rumah), school education (pendidikan sekolah) dan social education (pendidikan sosial). Program-program pendidikan nonformal di Jepang dilakukan melalui sistem pendidikan sosial, istilah pendidikan sosial di Jepang diperkenalkan pertama kali melalui koran sekitar akhir abad 18. Undang-undang tentang pendidikan sosial sebagai dasar sistem pengembangan pendidikan sosial disahkan pada tahun 1949.

Pendidikan sosial di Jepang di tekankan pada dua asas pokok, yaitu: (1) menjamin hak-hak setiap warga negara untuk belajar, khususnya mereka yang kurang mampu untuk bersekolah, dan (2) memajukan demokrasi yang partisipatif kepada masyarakat melalui proses pembelajaran di tengah-tengah lingkungan masyarakat (Ogawa, 1987, Sato, 1998).

Landasan Filosofis tersebut telah diwujudkan melalui sebuah proses dan kegiatan pembelajaran gratis atau murah dalam Citizens' public halls atau di Jepang dikenal dengan istilah **Kominkan** (*Community Cultural Learning Center*) yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. Namun demikian, Miya Narusima dalam hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa program-program pendidikan sosial di Jepang khususnya yang diselenggarakan melalui Kominkan pada saat ini kurang menekankan pada pendidikan dasar masyarakat dan pelatihan kejuruan. Implementasi program pendidikan sosial di Jepang lebih menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan berbagai budaya, gaya hidup (*lifestyle*), olah raga dan rekreasi, serta kegiatan pembelajaran masyarakat lainnya. Miya Narushima (2004)

1. Undang-undang pendidikan sosial

Pada tahun 1949, Undang-undang Pendidikan Sosial disusun sebagai bagian dari kerangka baru pendidikan pasca perang. Berdasarkan pada kesadaran terhadap fakta sejarah bahwa Pendidikan sosial di Jepang pernah dimanipulasi untuk tujuan perang oleh pemerintah kekaisaran, Undang-undang Pendidikan Sosial bermaksud mendirikan sistem pendidikan yang komprehensif serta dapat menjamin kebebasan pendidikan bagi masyarakat serta mengakar di tengah-tengah masyarakat. Lebih jelasnya lagi, Undang-undang tersebut menegaskan tentang 5 komponen yang harus dikembangkan sehubungan dengan pengembangan pendidikan sosial di Jepang terutama menyangkut: a) ruang lingkup pendidikan sosial, b) menetapkan peran pemerintah, c) peran Dewan Pendidikan, d) peran staf pemerintah, dan e) menyediakan sarana prasarana pendidikan sosial lainnya. Meskipun demikian Undang-undang Pendidikan Sosial yang disahkan pada tahun 1949 tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, di antaranya adalah revisi tahun 1959, 1999, dan 2001 yang nampaknya menjadi kejadian yang sangat kontroversial dalam sejarah Pendidikan Sosial di Jepang (Nagasawa, 2001).

Salah satu keistimewaan khusus Undang-Undang Pendidikan Sosial tahun 1949, dan alasan kenapa lebih dihargai oleh banyak pendidik masyarakat Jepang, mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut dianggap sebagai simbol pendidikan demokrasi, (Aso & Hori, 1997, Ogawa, 1987) seperti ditulis dalam Bab 5. Bab ini menjelaskan, bahwa Dewan Pendidikan Kota besar, Kota kecil, dan desa memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan mengenai pendirian dan pengembangan fasilitas pendidikan sosial melalui Kominkan. Di samping itu pula,

setiap Kominkan diharuskan membuat Badan Operasional Kominkan yang terdiri dari berbagai kelompok dan perkumpulan masyarakat guna mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan Kominkannya sendiri. Sehingga masyarakat dapat memutuskan isi program Kominkan sesuai dengan kebutuhannya sendiri (masyarakatnya)

Undang-undang tersebut menetapkan tentang peran administrasi pemerintah agar mendorong pengembangan kegiatan pendidikan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan secara mandiri dengan cara ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar kapanpun dan di manapun (Artikel 3). Berdasar pada artikel tersebut, maka aksi nyata yang dilakukan pemerintah guna mengimplementasikan undang-undang tersebut adalah menemukan sarana dan prsarana sebagai perantara terjadinya proses pembelajaran masyarakat. Berkat Undang-undang tersebut, maka dibangunlah berbagai fasilitas pendidikan sosial seperti: Kominkan, Museum, Perpustakaan publik, Pusat pengembangan generasi muda dan anak-anak, Pusat pengembangan perempuan dan fasilitas pendidikan sosial lainnya. Jumlah kelas dan pelajaran yang ditawarkan di sarana tersebut diperkirakan berjumlah 74,006 dengan lebih dari 120,000,000 orang yang belajar (Aso & Hori, 1997).

Dari jumlah tersebut, nampak jelas tingkat keseriusan pemerintah Jepang khususnya Pemerintah Kota dalam meningkatkan pendidikan nonformal khususnya pendidikan sosial bagi warga masyarakat. Terutama masyarakat yang tidak terlayani pendidikan formal atau sekolah. Oleh karena itu kebijakan pendidikan sosial pasca perang yang didukung oleh Undang-undang Pendidikan Sosial nampaknya telah berhasil menggapai tujuan

pembentukan dasar pendidikan sosial daerah yang solid di seluruh wilayah, terutama dengan penyediaan fasilitas (sarana/prasarana) pendidikan sosial.

Akimoto (2001), menjelaskan, bahwa banyak studi mengkritisi arah (tren) baru tentang pembelajaran di Kominkan yang lebih mengarah pada *leisure-oriented 'self-interest'*. Namun demikian studi historis perkembangan Kominkan selama lebih dari 50 tahun terakhir ini menggambarkan bagaimana Kominkan sangat membantu perkembangan gerakan demokrasi daerah pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an. Sejak tahun 1980-an isu tentang '*de-politicization Kominkan*' menjadi isu utama. Dengan pengenalan pembelajaran sepanjang hayat sebagai kebijakan baru pendidikan pada pertengahan tahun 1980-an nampaknya telah mempercepat '*de-localization*' praktek-praktek tradisional pendidikan sosial.

2. Kebijakan pembelajaran sepanjang hayat

a. Dari pendidikan sepanjang hayat sampai pembelajaran sepanjang hayat

Konsep belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) diperkenalkan di Jepang sekitar akhir tahun 1960-an. Tahun 1972, Faure Report dari UNESCO membenarkan konsep tersebut sebagai konsep yang sesuai (*relevan*) bagi masyarakat Jepang, namun demikian muncul berbagai kritikan tajam terhadap konsep tersebut, karena dianggap memberikan tekanan terlalu keras terhadap penyelenggaraan pendidikan formal khususnya sekolah. Ogawa (1991) membagi proses perkembangan pembelajaran sepanjang hayat di Jepang kedalam tiga periode; (a) periode pengenalan (dari akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an), (b) periode perkembangan (antara awal tahun 1970-an dan pertengahan tahun 1980-an), dan (c) periode lanjutan (dari pertengahan tahun 1980-an sampai sekarang). (Ogawa, 1991)

Ogawa berpendapat bahwa tujuan diperkenalkannya konsep *lifelong learning* di Jepang selama dua periode awal adalah untuk menambah pengetahuan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat, sehingga perkembangan daerah mempengaruhi program-program Kominkan dan menekankan gagasan pendidikan lanjutan. Selama periode ketiga, konsep *lifelong learning* (pembelajaran sepanjang hayat) telah diputar balikkan dan dimasukkan kedalam kebijakan-kebijakan nasional untuk menangani permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, Wilson (2001) berpendapat bahwa *lifelong learning* dapat dianggap sebagai garis hidup Jepang saat ini. Perubahan nama dari pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*) menjadi belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) mengindikasikan penekanan baru pada individu atau masyarakat sebagai agen pembaharu (*self-directed agents*) dalam rangka pembelajaran mandiri (Wilson, 2001). Di samping itu pula, penggunaan kata pembelajaran (*learning*) memecah peran monopoli Departemen Pendidikan dalam sistem pendidikan dan memacu departemen lain untuk bekerja sama atau ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi (Thomas, Uesugi, & Shimada, 1997). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pemerintah Jepang memungkinkan untuk mewujudkan undang-undang yang baru tersebut. Namun demikian Undang-Undang tersebut berpengaruh kurang dari dua tahun setelah laporan Badan Nasional Reformasi Pendidikan tahun 1988.

b. Undang-undang belajar sepanjang hayat (lifelong learning promotion) tahun 1990

Pada tahun 1990, pemerintah Jepang mensahkan Undang-undang belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*

promotion) dan mulai memperkenalkan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat sebagai kunci reformasi kebijakan pendidikan dan administratif. Undang-undang baru tersebut disahkan dalam waktu yang sangat singkat dan mendapatkan perlawanan sengit dari para pendidik masyarakat yang menyadari bahaya undang-undang baru tersebut. Salah satu kritik utama pada tahun 1990 adalah kurangnya penjelasan secara eksplisit mengenai istilah '*pembelajaran sepanjang hayat*'; padahal tujuan dari undang-undang yang baru tersebut adalah menciptakan struktur pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan setiap orang (masyarakat) untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran sepanjang hayat. Jelaslah bahwa dari luar undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan bahwa pemerintah akan menggunakan '*pembelajaran sepanjang hayat*' lebih dari sekedar konsep dasar yang digunakan dalam pendidikan sosial. Undang-undang tersebut dirancang agar rencana konkrit dalam implementasi kebijakan-kebijakan baru harus terus dikembangkan terutama melalui laporan dan rekomendasi Badan adhoc yang telah dibentuk. Untuk itulah pada tahun 1992 Badan Nasional belajar sepanjang hayat didirikan untuk memberikan saran bagi perkembangan kebijakan yang telah ditetapkan. Dari hasil studi-studi Wilson (2001) menjelaskan, bahwa Badan Pendidikan dan Badan Pusat Pendidikan telah mengeluarkan 10 kali laporan antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, di mana laporan-laporan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebijakan pendidikan. (Miya Narushima, 2004)

Inovasi utama Undang-undang belajar sepanjang hayat terangkum dalam tiga poin berikut: a) dukungan bagi tiap prefektur (serupa dengan pemerintahan provinsi) guna mendirikan Badan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Prefektur serta merencanakan pembelajaran sepanjang hayatnya sendiri; b) dukungan bagi lembaga bisnis swasta untuk bekerja sama dalam pengembangan masyarakat melalui pembelajaran sepanjang hayat yang terintegrasi dengan sektor-sektor publik dan pemerintah; dan (c) Departemen Perdagangan dan Perindustrian Internasional, birokrasi yang paling berpengaruh di Jepang, memiliki rencana untuk ikut terlibat memfasilitasi industri pembelajaran sepanjang hayat.

B. Pendidikan Sosial dan Kominkan

Jepang sebagai negara maju memiliki sejarah perjalanan pendidikan yang khas, khususnya perjalanan pendidikan sosial (*social education*) atau dalam Bahasa Jepang dikenal dengan sebutan **shakai kyoiku**. Diterapkannya konsep pendidikan sosial di tengah-tengah masyarakat sangat terasa pengaruhnya terhadap perkembangan sistem pendidikan khususnya perkembangan pendidikan orang dewasa dan perkembangan pendidikan masyarakat. Pendidikan sosial mampu merubah budaya belajar masyarakat secara revolusioner. (Maruyama 2006). Semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat memacu pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan pendidikan sosial yang diintegrasikan dengan pembangunan sektor-sektor lainnya. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mengikat masyarakat untuk tetap terus memacu diri, mendisiplinkan diri dalam berbagai kehidupan sehingga mendorong masyarakat untuk tetap meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui belajar secara inovatif.

Dengan tumbuh pesatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, tidak menyulitkan pemerintah dalam menerapkan berbagai aturan baik dalam bidang pendidikan maupun aturan-aturan lain yang dapat meningkatkan kehidupan

masyarakat. Sehingga tidak heran apabila semua sektor pembangunan di Jepang maju dengan pesat secara bersamaan dan saling mendukung.

Demikian halnya dengan sistem

pendidikan sosial dan sistem pendidikan formal, keduanya memiliki sistem dan aturan yang berbeda namun pada implementasinya saling mengisi dan saling mendukung dalam tatanan konsep *continuing education*. Maruyama (2006) menyatakan dalam satu tulisannya "*Japan is unique in that it two major laws which deal with adult education. Historically, a law called the Social Education Law has been the backbone of public adult education practice in post-war Japan since 1949. Following UNESCO's call for lifelong education, however, Japan started promoting this new concept as a central policy for adult and community education, and passed the 'Law Concerning the Development of Mechanisms and Measures for Promoting Lifelong Learning' (the Lifelong Learning Promotion Law) in 1990*".

Jepang merupakan Negara yang unik karena memiliki dua aturan dalam sejarah pengembangan pendidikan orang dewasa, salah satunya adalah peraturan pendidikan sosial yang dijadikan tulang punggung dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan orang dewasa sejak selesainya perang pada tahun 1949, pada saat ini Jepang memulai mempromosikan kebijakan pemerintah pusat tentang pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat melalui peraturan mekanisme pengembangan dan peningkatan pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning promotion*).



Gambar. 2.1 Salah satu Citizens' Public Halls
(Kominkan)

Akitoshi Teuchi (2006) menyebutkan, bahwa social education di Jepang memiliki kesamaan dengan nonformal education di Negara-negara lain. Dalam beberapa tulisan diterangkan, bahwa *social education* memiliki konsep yang sama dengan pendidikan nonformal (*nonformal education*), terutama dalam rangka pengembangan pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat. Sebagai sebuah Negara dengan tingkat disiplin yang tinggi baik pemerintah maupun masyarakatnya, perkembangan pendidikan social (*social education*) sangat pesat sejak mulai mendapatkan pengesahan tahun 1949 sampai pada saat disusunnya aturan tentang **lifelong learning promotion law** tahun 1990. Salah satu bentuk pelayanan pendidikan sosial bagi orang dewasa dan pendidikan masyarakat yang paling terkenal di Jepang adalah Citizens' public halls atau juga disebut dengan CCLC (*community cultural and learning centers*) dalam Bahasa Jepang dikenal dengan sebutan Kominkan.

Kominkan berdiri satu tahun setelah berakhirnya perang Dunia ke II. Sehingga Kominkan telah berkembang dan dikenal begitu lama atau hampir setengah abad lebih (60 tahun). Dengan demikian Kominkan didirikan sekitar tahun 1946 atau lebih tua empat tahun dari Undang-Undang Pendidikan Sosial. Kominkan didirikan dan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Jepang sebagai wujud dari kepedulian pemerintah akan pentingnya rekonstruksi bidang pendidikan dalam mengembalikan kejayaan Jepang sebagai Negara yang berdaulat dan demokrasi. Pemerintah Jepang pada saat itu menganggap, bahwa rekonstruksi bidang pendidikan melalui sekolah atau pendidikan anak-anak tidaklah cukup, sehingga diperlukan model pendidikan yang betul-betul mampu menyatu dan mampu melayani seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakatnya, maka model pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat merupakan sebuah konsep yang dianggap dapat melayani seluruh kebutuhan pendidikan

bagi masyarakat, (di antaranya program-program keterampilan bagi pendidikan orang dewasa). Pada saat itulah konsep *citizens' public halls* (Kominkan) direkomendasikan oleh pemerintah sebagai sebuah fasilitas pendidikan sosial di setiap pemerintahan Kota (city), dengan harapan Kominkan dapat membangun dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kepercayaan diri masyarakat Jepang.

Pada saat pertama kali didirikan Kominkan bertujuan untuk: a) memperkenalkan demokrasi secara partisipatif di tengah-tengah masyarakat Jepang, dan b) Memberikan kesempatan kepada masyarakat Jepang untuk memperoleh pendidikan yang layak, c) memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan-kegiatan Kominkan pada saat itu lebih diarahkan pada program-program pendidikan dan program-program keterampilan bagi orang dewasa (*adult education*). Di samping itu pula keberadaan Kominkan di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat: a) memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan orang dewasa yang memadai, b) mampu memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pemerintahan setempat, dan c) sebagai pusat interaksi sosial budaya (*social interactions*) masyarakat setempat.

Sejak didirikannya tahun 1946 dan mendapatkan status resmi sebagai lembaga pendidikan sosial pada tahun 1949, kominkan berkembang begitu pesat di Jepang dengan berbagai variasi program kegiatan, seperti: kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan (kegiatan apresiasi seni dan budaya), kegiatan-kegiatan olah raga dan kesehatan, rekreasi, laboratorium masyarakat, dan kegiatan lain yang menunjang kemajuan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Pada saat ini peran kominkan tidak lagi hanya diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat semata, akan tetapi kominkan

perannya semakin berkembang terutama dalam membantu sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dalam mempraktekan berbagai kemampuannya di masyarakat, baik sebagai tempat: penelitian, praktek lapangan, juga kegiatan lain yang menunjang kegiatan siswa/pelajar, mahasiswa, guru dan dosen serta asosiasi-asosiasi lainnya.

Kominkan atau Citizens' Public Halls dikembangkan berdasar kepada aturan article 5: dalam *Lifelong learning in Japan dijelaskan*, tentang berbagai kegiatan yang harus dilakukan kantor pendidikan kota sehubungan dengan social education, maka ada dua model kominkan yang di bawah pengawasan social education administration, a) urban Kominkan dan, b) rural Kominkan. Urban Kominkan didirikan di daerah perkotaan (kegiatan-kegiatannya diarahkan untuk melayani masyarakat kota), dan rural Kominkan adalah Kominkan yang didirikan di daerah perdesaan (kegiatan atau program-programnya diarahkan bagi masyarakat desa), kedua Kominkan ini seringkali disebut dengan legal Kominkan karena pengelolaannya dibawah aturan administrasi pemerintah Kota.



Gambar.2.2 Salah satu Kominkan mandiri di Kimitsu City (Jichi Kominkan)

Di samping kedua model Kominkan yang dikembangkan pemerintah ada juga Kominkan yang didirikan oleh masyarakat, asosiasi (organisasi) sukarela atau lembaga independent (non pemerintah) Kominkan jenis ini

dikenal dengan autonomous Kominkan (Kominkan mandiri)

Menurut survey Asosiasi Kominkan Nasional pada Bulan November 2002, jumlah Kominkan mandiri telah mencapai 76.883 buah, atau jauh lebih banyak dari Kominkan yang

didirikan pemerintah Kota atau dibawah pengelolaan/pengawasan administrasi pendidikan sosial daerah (Kotamadya). Sedangkan jumlah total legal Kominkan (CsPH) di seluruh Jepang hampir 18.000 buah dengan berbagai variasi kegiatan dan diselenggarakan hampir di seluruh wilayah kota di Jepang atau sekitar 91 % dari seluruh Kota yang ada. Fasilitas legal kominkan secara keseluruhan dibangun dan disediakan oleh pemerintah Kota di bawah Mentri Pendidikan dan aturan Social Education Law dan dikelola secara langsung oleh pemerintah Kota dengan menunjuk/mengangkat beberapa staf yang dibina oleh tokoh masyarakat lokal dan ada juga yang dibina para pendidik dari berbagai universitas atau perguruan tinggi yang membidangi *social education*. Petugas yang bertanggungjawab dan diberi wewenang untuk mengelola Kominkan terdiri dari: 1 orang president (direktur), 1 orang wakil president (wakil direktur), 1 orang supervisor dan 2 sampai dengan 3 orang staf atau pemegang (*clerck atau volunteer*).

Autonomous kominkan secara ideal memiliki beberapa kesamaan dengan PKBM, baik dilihat dari fungsi, prinsip pengembangan maupun dalam berbagai kegiatan yang diprakarsainya. Sedangkan legal Kominkan (Citizens' public halls) yang dikembangkan pemerintah Kota di Indonesia pengelolaannya mirip dengan SKB (sangggar kegiatan belajar), karena semua program dan fasilitas yang dikembangkan secara penuh dibiayai oleh pemerintah Kota, baik pegawai (*staff*) maupun kegiatan-kegiatannya. Begitu pula dengan Sanggar Kegiatan Belajar yang secara langsung mendapat fasilitas dari pemerintah kabupaten/ kota, sejalan dengan otonomi daerah sebageaian besar SKB telah dirubah menjadi UPTD (unit pelaksana teknis daerah). Begitu pula dengan keberadaan Kominkan di Jepang merujuk pada aturan *social education law* No.207. Aturan tersebut mengharuskan seluruh pemerintah

kota memprakarsai dan mengembangkan Kominkan secara independent.

Kominkan sebagai salah satu fasilitas layanan pendidikan sosial yang secara terintegrasi memiliki tugas dalam mengembangkan pendidikan masyarakat dan pendidikan orang dewasa dengan fasilitas-fasilitas pendidikan sosial lainnya terutama Perpustakaan, Museum, Pusat pengembangan pemuda dan anak-anak, Pusat pengembangan perempuan dan Pusat-pusat pengembangan layanan pendidikan sosial lainnya. Struktur dan keberadaan kominkan digambarkan berikut ini.

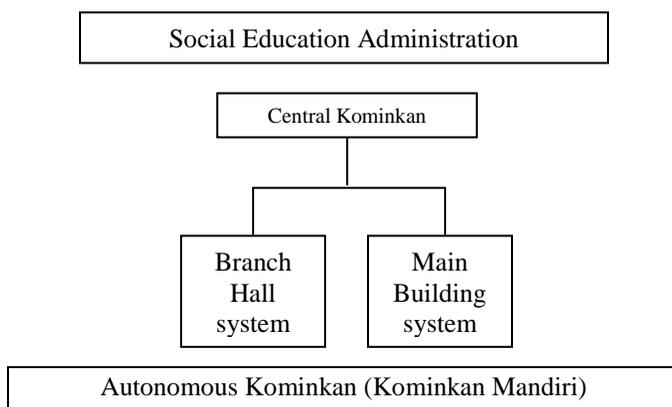


Diagram. 2.1 Model struktur Kominkan

Sumber : Akitoshi Teuchi, (2007)

Setiap Kota/City (sama dengan Kotamadya di Indonesia) memiliki Kominkan yang berbeda, baik pengelolaannya maupun pengembangannya. Luas kecilnya Kominkan sangat disesuaikan dengan luas dan area serta jumlah sasaran (penduduk) di daerah tersebut. Citizens' public halls (Kominkan) didirikan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat baik urban kominkan, rural Kominkan maupun autonomous Kominkan. Luas area kominkan rata-rata berkisar 1500 m² dan itu juga bergantung pada kemampuan daerah masing-masing terutama untuk penyediaan areal (lahan) dan

program yang dikembangkan. Pada setiap Kominkan rata-rata melayani 10.000 sampai dengan 20.000 penduduk (masyarakat). Akitoshi Teuchi (2006)

Di beberapa Kota didirikan Kominkan (Citizens' public halls) terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan mendukung kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah. Di Jepang terdapat 24.000 Sekolah Dasar dan 10.000 Sekolah Menengah Pertama, jadi kira-kira ada dua Kominkan untuk setiap Sekolah Menengah Pertama. Ada juga di sebagian kota yang mendirikan Kominkan lebih besar dan lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

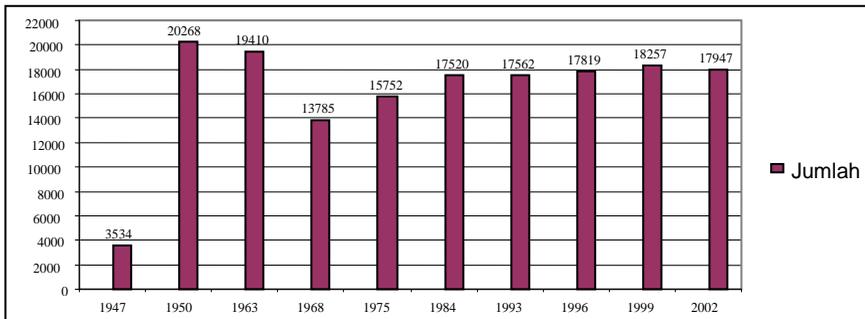
Sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Jepang terutama perkembangan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat melalui citizens' public halls (Kominkan) tidak lagi hanya sekedar memperhatikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat sebagai sebuah kebutuhan dasar akan tetapi sudah bergeser kepada peningkatan *self-actualization* dan *self-development* masyarakat. Hal ini terjadi sejak tahun 1960, sehingga program-program Kominkan tidak hanya menyangkut kegiatan-kegiatan pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat, akan tetapi sudah mulai berkembang dengan berbagai kebutuhan layanan lainnya seperti, program pertanian, seni tradisional masyarakat Jepang, program kesehatan, program rekreasi, olah raga, tataboga (*table manner*), program keterampilan dan program-program yang berkaitan dengan teknologi, penyaluran hobi, pengembangan seni-seni modern (musik modern), dan program-program ekonomi serta bisnis. Sejak saat itulah program Kominkan terbagi dua; ada program yang berkaitan dengan nuansa tradisional kehidupan masyarakat Jepang dan ada program-program yang berkaitan

dengan masalah-masalah modernisasi baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun modernisasi di bidang sosial, seni dan budaya.

Disamping itu pula program-program Kominkan sudah diarahkan pada hal-hal yang berhubungan dengan *entrepreneurship* diri masyarakat dan pengembangan kemandirian pada taraf *core value* ideal yakni *excellence* (rasa unggul), hal ini tampak dari program-program yang dikembangkan Kominkan banyak yang berbasis *lifestyle*. Akimoto menjelaskan bahwa, pada saat ini Kominkan menjadi sebuah mainstream bagi pengembangan dan pembangunan masyarakat Jepang. (Akimoto, 2001)

Berikut ini digambarkan perkembangan Kominkan dari tahun 1947 sampai tahun 2002.

Grafik 2.1 Perkembangan Legal Kominkan (CCLC) di Jepang dari tahun 1947 sampai tahun 2002



Sumber The Kominkan, National Kominkan Association (2007)

C. Prinsip dan konsep Kominkan

Keberadaan Kominkan di Jepang tidak terlepas dari Undang-Undang tentang pendidikan sosial, di mana Undang-Undang tersebut telah memberikan jaminan yang sangat signifikan bagi perkembangan dan keberadaan Kominkan di tenga-tengah masyarakat. Dengan Undang-Undang pendidikan

sosial Kominkan menjadi bagian penting sistem pendidikan di Jepang, terutama dalam memberikan jalan bagi tumbuhnya budaya demokratis dalam sistem pendidikan serta penghargaan terhadap proses belajar di luar pendidikan formal. Kehebatan Jepang sebagai Negara maju dalam memfasilitasi bidang pendidikan formal, tetap memberikan fasilitas sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sosial dan secara demokratis memberikan kebebasan kepada semua warga negaranya untuk mengikuti model pendidikan di luar pendidikan formal. Kebebasan ini diimplementasikan melalui model terintegrasi dalam penyelenggaraan system pendidikan formal dan system pendidikan sosial khususnya (Kominkan, Perpustakaan, Museum, Pusat pengembangan pemuda dan anak-anak serta Pusat pengembangan perempuan dll).

Undang-undang atau aturan tentang pendidikan sosial disusun pada tahun 1949 dibawah pendudukan Amerika sebagai bagian dari restrukturisasi kerangka pendidikan pasca Perang Dunia ke II. Keberadaan pendidikan sosial di Jepang pernah dimanupasi oleh pemerintah kekaisaran untuk tujuan perang, terutama sebelum dan selama perang berlangsung. Undang-undang Pendidikan Sosial bertujuan untuk mendirikan sistem pendidikan di luar sistem pendidikan formal (sekolah) dengan model pembelajaran yang lebih komprehensif dan dijamin akan lebih mengakar di tengah-tengah masyarakat. Undang-undang tersebut menegaskan, bahwa ruang lingkup pendidikan sosial, meliputi penetapan: peran pemerintah, dewan pendidikan, staf (pegawai) pemerintah, lembaga-lembaga daerah (institusi daerah yang meliputi Kominkan, Perpustakaan, Museum, Pusat Pengembangan Pemuda, Pusat Pengembangan Perempuan, Pusat Pengembangan Masyarakat (*community center*) dsb.

Salah satu keistimewaan khusus UU 1949, dan alasan kenapa lebih dihargai oleh para pendidik di Jepang, mereka menganggap bahwa undang-undang tersebut sebagai symbol

pendidikan demokrasi. Semua keputusan mengenai pendirian dan penyelenggaraan Kominkan (*Community Cultural Learning Center*) dipercayakan kepada Dewan Pendidikan Kotamadya. Di samping itu pula, setiap Kominkan diwajibkan untuk membuat *Unei shingi-kai* (Badan Operasional) yang terdiri dari para ketua dari berbagai kelompok sukarelawan daerah, sehingga diharapkan dengan keterlibatan mereka semua masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan pembelajaran yang dilakukan di daerahnya (masyarakatnya).

Oleh karena itu, setiap Kominkan lokal (daerah) menetapkan dan memutuskan isi program yang akan dikembangkannya secara bebas serta tergantung pada kebutuhan dan minat masyarakat. Meskipun Kominkan yang pertama dibangun sekitar tahun 1946 atas inisiatif Departemen Pendidikan, namun Undang-Undang tahun 1949 tersebut benar-benar menegakkan dan menjamin sistem Kominkan, yang dianggap telah mampu mengangkat dan memajukan model pembelajaran berbasis masyarakat (*community-based learning*) yang pernah ada.

Sebagian masyarakat Jepang masih berpendapat, bahwa model pembelajaran yang disediakan Kominkan mencerminkan *self-less community* yang mereka anggap berhadapan dengan isu budaya dan lokal. Namun demikian anggapan ini tidak menyurutkan partisipasi masyarakat untuk tetap menimba ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai pengalaman hidupnya di tengah-tengah masyarakat dalam sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan di Kominkan.

D. Definisi dan tujuan Kominkan

Seperti telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, pada pertama kali didirikannya, Kominkan (Citizens' Public Halls), merupakan pusat kegiatan belajar orang dewasa dan

masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi atau bakat yang difasilitasi secara penuh oleh pemerintah Jepang. Sejalan dengan diberlakukannya desentralisasi pendidikan *Chiho Bunken Ikkatsu-ho* (Decentralization Law) di seluruh Jepang, pengelolaan dan fasilitasi Kominkan telah dirubah dan menjadi kebijakan serta tanggungjawab pemerintah kota sehingga kominkan lebih independent (tidak bergantung pada pemerintah pusat). Meskipun pada pertamakali pendiriannya pemerintah kota mendapat bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan perfektur.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah pendidikan sosial serta kebutuhan akan pendidikan masyarakat, definisi Kominkan terus disempurnakan, terutama disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi daerah, model pengelolaan serta sistem pendidikan sosial sebagai partner dalam pengembangan pendidikan dengan sistem pendidikan formal (sekolah). Oleh karena itu peran Kominkan sebagai salah satu wadah pendidikan sosial mengalami perubahan yang sangat drastis. Hal ini terlihat dari beberapa program yang dikembangkan serta aturan yang diberlakukan pemerintah kota yang mengacu kepada revisi struktur *social education law* pada tahun 2001 dengan berdasar pada laporan *National Lifelong Learning Councils'*. Beberapa program baru yang dikembangkan terutama berkaitan dengan perubahan pola baru kehidupan masyarakat kaum perempuan dan orang dewasa. Di antaranya adalah: program pendidikan keluarga bagi ibu-ibu muda, pengembangan masyarakat sukarelawan, sertifikasi tutor pendidikan orang dewasa, pendidikan karier bagi orang dewasa sebagai sukarelawan di daerah, dan tipe-tipe pembelajaran *experiential learning* lainnya.

Dengan karakteristik tersebut maka Kominkan dapat disebut sebagai lembaga pendidikan nonformal (*social*

education), yang memberikan berbagai materi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta wawasan dalam pengembangan dirinya terutama yang menunjang karier, pekerjaan, sekolah, keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota.

Mengacu pada definisi tersebut maka Kominkan memiliki tujuan:

1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan yang dapat menunjang karier, pekerjaan, sekolah, organisasi, kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat (*human relations*).
2. Memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup baik dari segi sosial politik, teknologi, ekonomi, bisnis, maupun olah raga dan rekreasi.
3. Menyediakan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat.
4. Memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat dalam rangka pengembangan budaya tradisional masyarakat Jepang dan perkembangan budaya modern.

E. Kominkan sebagai lembaga pendidikan

Pendidikan sosial memiliki berbagai bentuk dan jenis program, baik yang diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah maupun kegiatan-kegiatan pendidikan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Beberapa kegiatan dan fasilitas pendidikan sosial di antaranya adalah: Kominkan, Perpustakaan Publik, Museum, Pusat Pengembangan Pemuda, Pusat Pengembangan Anak-Anak, Pusat Pengembangan Perempuan dan kegiatan

lain yang serupa. Kominkan memiliki status yang terpisah dengan kegiatan/fasilitas pendidikan sosial lainnya sesuai dengan aturan (Undang-Undang) Pendidikan Sosial yang diberlakukan.

Pada saat ini Kominkan dikelola oleh Dewan Pendidikan Lokal (daerah) dan berdiri sendiri serta terpisah dari cabang pemerintahan lokal (daerah) lainnya. Dengan demikian Kominkan membagi status yang serupa dengan status perpustakaan publik dan museum sebagai institusi pendidikan publik. Disamping itu pula, fungsi-fungsi yang dikembangkan Kominkan dapat disamakan dengan lembaga-lembaga yang dibangun dan dirancang dalam sebuah gaya Jepang yang unik.

Kominkan didirikan dalam unit pemerintahan lokal (daerah) yang berarti bahwa anggaran untuk membangun dan menjalankan program datang dari dana masyarakat (public). Kominkan sebagai gerakan pendidikan sosial, sampai saat ini merupakan salah satu fasilitas dan model program pendidikan sosial yang telah terbukti sebagai sebuah sistem pendidikan masyarakat yang dianggap paling representatif. Dalam mendirikan Kominkan, Pemerintah Kota menerima bantuan anggaran dari prefektur dan pemerintah pusat. Tetapi bantuan anggaran (dana) akan dihentikan jika Kota telah mencapai kemampuan pengelolaan pemerintahan pada level (kemampuan) yang telah ditetapkan atau aturan standar yang diberlakukan pemerintahan Jepang.

Seperti diuraikan pada bagian awal laporan ini, di samping Kominkan yang dibangun dan dijalankan dengan anggaran pemerintah Kota atau dana public, ada juga Kominkan (CsPH) yang dibangun dan dijalankan dengan anggaran sukarela atau gotong royong langsung masyarakat setempat (masyarakat/penduduk lokal). Kominkan model ini disebut dengan Kominkan mandiri (autonomous Kominkan), Kominkan jenis ini tidak secara langsung ditempatkan atau dibawah pemerintahan lokal (Kota) manapun, melainkan

menjadi milik masyarakat itu sendiri (village). Namun demikian Kominkan mandiri cakupan kegiatan dan skalanya lebih kecil dan secara umum lebih dikenal di mata masyarakat perdesaan (village).

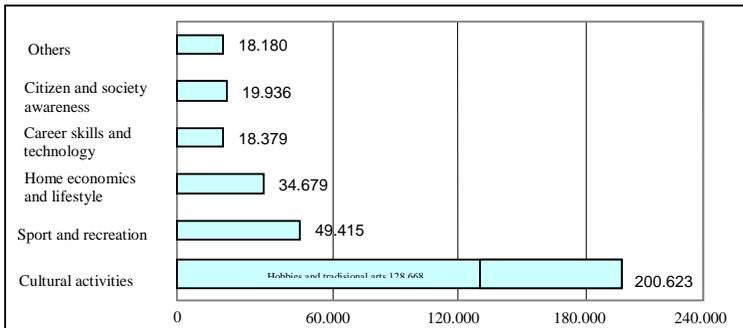
Program-program Kominkan mandiri tidak kalah dengan program-program Central Kominkan (branch hall atau main building), karena program-program yang dikembangkan lebih membumi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga Kominkan jenis ini berkembang begitu pesat di seluruh masyarakat Jepang. Dengan jumlah hampir empat kali lipat jumlah Kominkan yang dijalankan dengan anggaran pemerintah (public).

Kenyataan ini menunjukkan, bahwa masyarakat Jepang khususnya masyarakat perdesaan menganggap keberadaan Kominkan mandiri sangat penting dalam membangun kehidupan orang-orang dalam masyarakat tersebut di samping Kominkan yang dikelola pemerintah kota. Kominkan mandiri dijalankan dan dikelola oleh penduduk daerah guna memperkuat rasa gotong royong, solidaritas, partisipasi dalam memperbaiki kondisi masyarakatnya. Berbagai program yang dikembangkan Kominkan mandiri disamping merupakan binaan dari legal Kominkan juga melakukan kerjasama dengan fasilitas pendidikan sosial lainnya. Karena hanya fasilitas pendidikan sosial seperti itulah yang dibangun di seluruh Jepang baik di kota maupun di desa. Maka, banyak fasilitas pendidikan sosial lain yang dibangun pemerintah kota seperti Perpustakaan, Museum, Pusat pengembangan pemuda dan anak-anak, Pusat pengembangan perempuan dan sentra-sentra masyarakat secara terintegrasi fungsinya berhubungan dengan Kominkan. Sehingga, Kominkan adalah fasilitas pendidikan sosial baik yang disediakan pemerintah maupun yang dikembangkan masyarakat secara sukarela bukan hanya sekedar gedung pertemuan masyarakat belaka, akan tetapi mencakup berbagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran

serta pembangunan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Kominkan memiliki tiga ciri utama yaitu:

1. Kominkan adalah institusi pendidikan yang tidak hanya sekedar menanamkan informasi yang khusus (spesifik) dalam memberikan pengetahuan, atau keahlian bekerja, akan tetapi juga Kominkan memiliki tujuan untuk memberikan tambahan berbagai informasi pengetahuan dll kepada masyarakat melalui kontak langsung secara personal. Contoh Inggris memiliki sentra-sentra masyarakat dan perguruan tinggi masyarakat sebagai institusi pendidikan masyarakat. Indonesia memiliki PKBM dan SKB.
2. Mengacu pada karakteristik pertama, maka beberapa kegiatan Kominkan tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan untuk bekerja, akan tetapi sampai pada bagaimana masyarakat (warga belajar) dilibatkan dalam pencarian aktualisasi diri (*self-actualization*) atau makna hidup. Salah satu alasan dasar belajar di Kominkan adalah untuk meningkatkan tingkat budaya seseorang sehingga dapat mempertinggi kualitas hidup.
3. Kominkan tidak terbatas pada pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat pada umumnya, akan tetapi melibatkan berbagai kalangan termasuk kegiatan para pemuda dan anak-anak, karena Kominkan merupakan sistem yang terbuka bagi semua kalangan. Keyakinan ini timbul ketika melihat kondisi Kominkan yang dikelola oleh pemerintah kota dan Kominkan yang secara langsung dikelola oleh masyarakat secara sukarela, berkembang bersama dan mendapat sambutan masyarakat secara representatif.

Grafik 2.2 Jumlah sponsor yang membiayai berbagai kegiatan Kominkan



Sumber: National Kominkan Association (2006)

Kominkan yang dikelola dan dibawah pengawasan pemerintah Kota (Social Education Administration) berkembang dengan tidak menggantungkan diri anggarannya pada sumbangan masyarakat (sukarelawan) semata. Pada grafik.4.2. digambarkan tentang jumlah sponsor yang terlibat dalam berbagai kegiatan Kominkan:

Berdasar pada karakteristik-karakteristik tersebut, maka asas dasar yang dijadikan tolok ukur pengembangan dan pendirian Kominkan meliputi berbagai kategori:

1. *pertama*, terjaminnya asas kebebasan dan persamaan hak. Asas ini bukanlah tugas yang mudah tetapi ini adalah asas yang tidak dapat diganggu gugat, dan Kominkan telah menemukan sejumlah metoda atau cara untuk mencapainya, seperti menyediakan layanan penitipan anak bagi ibu muda yang ingin ikut andil dalam kegiatan.
2. *Kedua*, layanan yang disediakan Kominkan harus gratis, seperti halnya asas yang dipakai untuk perpustakaan publik di seluruh dunia dan untuk perpustakaan publik Jepang yang diatur oleh Undang-undang tentang perpustakaan. Tutor (Pengajar, pembimbing, pelatih) dan pelajaran yang disponsori oleh Kominkan juga gratis.

Untuk mendorong partisipasi yang lebih besar lagi, kelompok yang ingin menggunakan sarana tersebut juga tidak akan dipungut biaya asalkan mereka telah memenuhi kriteria tertentu.

3. *Ketiga*, otonomi sebagai institusi untuk belajar dan tempat pengembangan budaya. Sebagai sebuah institusi pendidikan, staf Kominkan harus mengatur Tutor (Pengajar, pembimbing, pelatih) dan pelajaran; jika tidak, Kominkan hanya akan menjadi gedung pertemuan belaka.
4. *Keempat*, Kominkan harus memiliki pegawai (staff). Sangatlah penting memberikan kesempatan belajar kepada semua golongan usia, konsep ini merupakan inti dalam Kominkan sebagai implementasi konsep pembelajaran sepanjang hayat. Berdasar pada konsep itu staf Kominkan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar melalui pengembangan program pendidikan baca tulis, program bagi orang-orang cacat, dan pelajaran yang dirancang untuk orang-orang yang kehilangan kesempatan untuk belajar (*unopportunity*).
5. *Kelima*, Kominkan tidak boleh berlokasi di tempat terpencil melainkan harus berlokasi di tempat yang mudah dijangkau orang atau masyarakat luas, sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah kota merencanakan untuk membangun Kominkan di setiap distrik Sekolah Menengah Pertama.
6. *Keenam*, sarana yang tersedia di Kominkan harus memadai khususnya untuk memudahkan akses bagi orang-orang lanjut usia dan orang-orang cacat. Banyak hal yang masih harus dilakukan pada bagian ini. Rencana yang sedang dikembangkan saat ini adalah membuat jalan khusus (akses) dan lift untuk kursi roda, sarana toilet yang layak, dan bus bagi mereka yang memerlukan bantuan untuk pergi ke Kominkan.

7. *Ketujuh (terakhir)*, partisipasi masyarakat setempat. Pihak pengelola diwajibkan secara penuh untuk menjelaskan visi, misi, tujuan dan program Kominkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan baik melalui rapat masyarakat, panitia perencana pembangunan kota, pertemuan informal dengan para pengguna Kominkan dll. Di samping itu pula, Dewan Manajemen Kominkan harus membentuk perwakilan masyarakat daerah untuk mengawasi kegiatan Kominkan. National Kominkan Association (2006).

F. Peran dan fungsi Kominkan bagi masyarakat dan pemerintah

Berdasar kepada buku tentang Kominkan yang diterbitkan “National Kominkan Association” tahun 2006, menyebutkan, bahwa tugas yang paling utama staf Kominkan adalah merencanakan berbagai program pendidikan dan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik (warga belajar) serta masyarakat lokal atau masyarakat di mana kominkan berada juga memenuhi kebutuhan pemerintah Kota melalui berbagai model kegiatan. Oleh karena itu staf Kominkan bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat, materi program serta bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan bagi kegiatan berbagai program yang diperlukan kelompok belajar atau di Jepang dikenal dengan kelompok masyarakat. Jenis atau ruang lingkup bantuan atau bahan pembelajaran yang dibutuhkan program kegiatan bagi peserta didik atau masyarakat (partisipasi) meliputi lima fungsi:

1. **Pertemuan: menyiapkan atau menyediakan ruang pertemuan** sebagai tempat kegiatan atau tempat berkumpul masyarakat. Pada tempat tersebut masyarakat dapat belajar bersama guna meningkatkan pembangunan daerahnya.

2. **Pembelajaran: tempat pembelajaran** bagi masyarakat guna memperoleh pengetahuan, keterampilan serta sikap hidup yang lebih baik terutama dalam menemukan jalan hidup mereka sendiri. Pada tempat tersebut masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih baik antar sesamanya, memahami hubungan antar makhluk hidup, dan lingkungan sekitarnya. Hal-hal yang dipelajari tidak terbatas pada jenis pengetahuan dan kebudayaan tertentu saja, akan tetapi apa yang dipelajari harus relevan dengan semua aspek kehidupannya.
3. **Jaringan: mengembangkan jaringan** antar anggota masyarakat dan antar kelompok masyarakat sehingga mereka dapat saling tukar pengalaman, pengetahuan atau keahlian-keahlian khusus, sehingga pengetahuan, pengalaman dan keahlian-keahlian tersebut bermanfaat dalam rangka membantu pembangunan daerahnya.
4. **Pembangunan Masyarakat**, Kominkan menyediakan tempat dan kesempatan bagi semua warga masyarakat dalam membangun diri dan masyarakatnya. (*Develop themselves and their communities*)
5. **Penemuan: penemuan-penemuan baru (inovasi)**, Kominkan membantu menemukan hal-hal yang baru dan mengembangkan temuan-temuan yang sudah ada di masyarakat, di mana hasil-hasil temuan tersebut disediakan bagi masyarakat serta menjadi informasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kominkan (2006)

Peran-peran tersebut memberikan pemahaman kepada kita ketika membandingkan dengan peran PKBM sebagai pusat pembelajaran masyarakat dengan peran Kominkan sebagai citizens'public halls. Dari kelima aspek tersebut memiliki kesamaan yang sangat tajam terutama dilihat dari aspek pembangunan masyarakat, tempat pembelajaran dan membangun jaringan kerjasama. Namun demikian jika kita memahami PKBM sebagai sebuah lembaga pendidikan

masyarakat yang dibangun untuk dan oleh masyarakat serta menganut prinsip pengembangan PKBM berbasis program dan pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan sasaran dan sarana prasarana seadanya, maka kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi Kominkan (Citizens' Public Halls). Kondisi perbedaan tersebut sangat difahami karena Jepang sebagai Negara maju dan kaya, juga sejarah perkembangan pendidikan nonformal di Jepang khususnya Kominkan sudah begitu lama apalagi kalau dibandingkan dengan perbedaan kondisi sosial ekonomi, perkembangan teknologi/industri dan budaya yang dianut masyarakatnya.

Di samping peran-peran tersebut, Kominkan sebagai lembaga pendidikan nonformal atau lembaga pendidikan sosial yang dibangun pemerintah kota maupun yang dibangun langsung oleh masyarakat dan lembaga sosial (sukarela) lainnya memiliki lima ciri utama: a) Kominkan memiliki aturan pendirian dan pengelolaan yang jelas dalam social education law (article 5), b) Program yang dikembangkan Kominkan selalu mengacu (berbasis) pada fasilitas yang disediakan atau tersedia, b) program yang dikembangkan berbasis kebutuhan lokal, c) program yang dikembangkan berbasis kehidupan aktual masyarakat, d) program yang dikembangkan berbasis teknologi, dan e) program yang dikembangkan berbasis networking. Berdasar kepada lima ciri tersebut, maka konsep yang pertama harus menjadi acuan pemerintah kota dan Kominkan dalam mengembangkan programnya adalah daya dukung fasilitas yang dibutuhkan baik daya dukung sumberdaya manusia, sumberdaya material maupun financial.

Konsep tersebut selaras dengan aturan yang diberlakukan ***Chiho Bunken Ikkatsu-ho*** (Decentralization Law) dan social education law. Dalam buku tentang Japanese Social Education yang ditulis Akitoshi Teuchi, (2006:78) disebutkan, bahwa *Citizens' Public Halls are an original social education facility in Japan, they were promoted in Japan through establishment*

and administration of citizens' public halls that based on a notice from a subordinate officer of the Ministry of Education in 1946. As the social education law was enacted in 1949, citizens' public halls were registered as a social education facility established by municipality.

Perkembangan Jepang yang begitu pesat baik dari segi pengetahuan, teknologi dan budaya terutama setelah tahun 1960, fungsi Kominkan sangat dirasakan sekali dalam membangun masyarakat, baik masyarakat kota maupun daerah perdesaan. Terutama program-program pendidikan nonformal yang dianggap dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan (skills), wawasan dan disiplin masyarakat Jepang terhadap berbagai hal yang mendukung modernisasi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang industri selepas Perang Dunia kedua, Jepang menjadi salah satu negara terkemuka di dunia dan menjadikan pendidikan formal dan nonformal sebagai tulang punggung pembangunan. Sehingga pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban atau bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat dibawah naungan Menteri Pendidikan dan Kantor Pendidikan Kota.

Maka beberapa fungsi Kominkan yang dapat dijelaskan berdasar kepada kondisi tersebut di antaranya adalah :

1. Sebagai ***tempat pendidikan masyarakat***, fungsi Kominkan sebagai tempat pendidikan masyarakat ditandai dengan tersedianya berbagai fasilitas yang komprehensif bagi penyelenggaraan belajar dan pembelajaran masyarakat, serta berbagai pertemuan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan (pembelajaran), terutama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa kominkan juga menyediakan jenis pendidikan setara Diploma dalam bentuk nonformal education, terutama untuk bidang keterampilan/teknologi dan bahasa seperti Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing

lainnya dan juga Bahasa Jepang, sasarannya tidak saja ditujukan bagi orang dewasa dan para pemuda (pekerja) namun juga diarahkan bagi para siswa sekolah formal. Peran Kominkan pada program ini sebagai *complementary* bagi pendidikan formal. Sebagai tempat pendidikan masyarakat, pendirian perpustakaan sebagai penunjang Kominkan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang fungsi ini. Sehingga perpustakaan merupakan fasilitas khusus yang disediakan di setiap Kominkan dalam rangka meningkatkan minat baca dan pembelajaran masyarakat.

2. Sebagai tempat ***pengembangan kegiatan-kegiatan sosial***, olah raga, rekreasi (study tour), dan berbagai kegiatan kepemudaan serta kegiatan-kegiatan penyaluran hoby masyarakat (*lifestyle*). Untuk menunjang fungsi-fungsi tersebut Kominkan menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana (gedung, plaza, ruangan olah raga/gymnasium, dan ruangan-ruangan senam lainnya), yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang terjadwal secara penuh, part time atau bersifat sementara. Juga disediakan para instruktur (pembimbing) yang memiliki kualifikasi standar.
3. Sebagai tempat dan ***pusat pengembangan seni dan budaya***. Dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan pengembangan seni dan budaya baik yang berhubungan dengan seni dan budaya tradisional Jepang maupun seni modern, Kominkan menyediakan tempat khusus teatre dan music halls ruangan-ruangan khusus seperti ruang masak/cookery, ruangan tempat pembuatan keramik/kerajinan keramik, ruang pameran, Japanese style room seperti ruangan untuk minum tea ala Jepang/sado, ruang dansa, serta berbagai ruangan untuk mendukung pengembangan program kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan.

4. Tempat pengembangan teknologi *komunikasi dan informasi*. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, beberapa Kominkan menyediakan fasilitas ruangan untuk menunjang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya teknologi penyiaran, baik radio maupun televisi, serta pembuatan majalah, surat kabar, buletin dan kegiatan lain, meskipun kegiatan ini diadakan oleh Kominkan hanya sekedar untuk menyalurkan hoby dan rekreasi masyarakat.
5. Sebagai pusat *pertemuan masyarakat* dalam rangka peningkatan pembangunan masyarakat dan lingkungan alam. Kominkan menyediakan tempat-tempat pertemuan khusus masyarakat, yang dilengkapi dengan sarana informasi pembangunan masyarakat dan berbasis teknologi komputer. Serta sebagian Kominkan menyediakan areal (lahan) khusus untuk pengembangan model percontohan (pertanian, kehutanan, perkebunan dll).
6. Meskipun jepang sudah menjadi negara modern dan maju baik dalam tatanan ekonomi maupun industri, namun pembangunan masyarakat masih menjadi ciri khas tersendiri bagi seluruh masyarakat Jepang khususnya yang berada di daerah pedesaan. Untuk mendukung implemantasi pembangunan masyarakat, Kominkan menyediakan tempat khusus bagi pertemuan-pertemuan masyarakat, rapat-rapat lingkungan masyarakat setempat, meningkatkan kehidupan berkeluarga, partisipasi, dan gotong-royong bagi para orang dewasa, para pemuda dan anak-anak terutama dalam menjaga keutuhan lingkungan alam menjadi ciri khas khusus program Kominkan terutama Kominkan mandiri atau Kominkan yang secara langsung dikelola masyarakat. Oleh karena itu Kominkan menyediakan fasilitas ruangan khusus seperti: ruang konferensi, ruangan exhibisi dan tempat (area) untuk uji coba berbagai kegiatan pembangunan masyarakat.

Akitoshi Teuchi (2006) (hasil observasi di daerah Kimitsu City Sunami Kominkan).

Sebenarnya masih banyak fungsi lain Kominkan, namun demikian fungsi-fungsi yang telah disebutkan dianggap dapat mewakili dan hampir tersedia di seluruh Kominkan. Bagi pemerintah kota kominkan berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam memberdayakan masyarakat, serta sebagai implementator berbagai program pendidikan nonformal (*social education*) yang diperuntukan bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta dalam membina dan membangun hubungan masyarakat (*human relation*) dalam rangka aktualisasi diri.

G. Program-program dan fasilitas pendidikan sosial (*Social Education*)

Berkembangnya pendidikan sosial atau nonformal education di Jepang menuntut pemerintah khususnya pemerintah kota memfasilitasi secara penuh berbagai kebutuhan yang dapat mendukung keberhasilan program-program kegiatan yang diusung. Berbagai fasilitas yang dibangun pemerintah Jepang selalu mengacu pada aturan-aturan sistem pendidikan yang diberlakukan, seperti pengembangan Citizens public halls, mengacu pada social education law No. 207, pendirian perpustakaan mengacu pada peraturan perpustakaan No. 118 (*library law*), pendirian museum mengacu pada the museum law 285. Program-program yang dikembangkan sosial education selalu mendukung atau terintegrasi dengan sistem pendidikan formal. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang diberlakukan dalam lifelong learning promotion dalam aturannya disebutkan, bahwa pendidikan sosial di Jepang mengatur dan memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan masyarakat bukan hanya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Citizens' public halls akan tetapi juga

kegiatan-kegiatan fasilitas pendidikan sosial lainnya seperti perpustakaan, museum serta pusat-pusat pengembangan masyarakat lainnya di luar pendidikan sekolah dan sekolah rumah (pendidikan di rumah). Berdasar kepada fungsi pendidikan sosial. Beberapa program yang menjadi andalan di antaranya adalah:

1. Program Kominkan dan penyediaan fasilitas pendukung

Secara teknis berbagai program yang dikembangkan Kominkan sangat bergantung kepada fasilitas yang tersedia serta kemampuan sumberdaya manusia (tutor, fasilitator) atau petugas khusus yang bertanggungjawab dalam mengembangkan program-program Kominkan. Program-program Kominkan sangat bergantung kepada kreativitas sumberdaya manusia (staff, instruktur, tutor dan fasilitator). Program-program yang dikembangkan biasanya secara teratur (terjadwal) disosialisasikan atau di tawarkan kepada seluruh masyarakat, melalui berbagai media yang dimiliki; seperti internet, televisi, radio, surat kabar, majalah yang diterbitkan Kominkan, atau terjadwal secara khusus di buletin juga papan pengumuman Kominkan. Bagi masyarakat yang membutuhkan program tersebut mereka akan mengakses melalui internet, surat maupun secara langsung datang ke tempat (Kominkan).

Kriteria dasar yang dijadikan prinsip pengembangan program pendidikan sosial melalui kominkan adalah pengembangan belajar sepanjang hayat, dengan aturan tersebut program yang dikembangkan Kominkan semakin menjadi pengikat bagi tumbuhnya kebiasaan dan budaya belajar masyarakat yang lebih disiplin. Dengan prinsip itu masyarakat tersadarkan bahwa belajar tidak boleh berhenti setelah sekolah formal selesai, namun belajar harus terus dilakukan selama usia masih ada. Dengan konsep belajar

sepanjang hayat, masyarakat bukan hanya tersadarkan akan tetapi aktivitas belajar masyarakat bisa dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya. Sehingga kondisi ini menjadikan motivasi yang kuat bagi pemerintah kota khususnya kominkan untuk mengembangkan berbagai fasilitas yang dapat menumbuhkan minat dan kebiasaan belajar masyarakat yang lebih membumi dan membudaya.

Peran pendidikan nonformal (*social education*) di Jepang tidak diarahkan sebagai program pengganti *substitute* bagi pendidikan formal akan tetapi lebih diarahkan pada penambah dan pelengkap. Karena pendidikan formal sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat Jepang saat ini melalui program kembali bersekolah. Sudah hal yang sangat wajar kalau berbagai program yang dikembangkan pendidikan nonformal khususnya Kominkan terpadu dengan kurikulum sekolah formal dan terpadu dengan kehidupan sosial, maka kebutuhan akan Kominkan sebagai pendamping sekolah merupakan program yang sangat dirasakan bagi pendidikan sosial khususnya bagian pengembangan pendidikan berkelanjutan di pemerintahan kota. Setiap program yang ditawarkan Kominkan selalu mendapat respon positif dari masyarakat. Di samping itu pula program-program yang ditawarkan selalu berbasis fasilitas yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dan kebutuhan masyarakat.

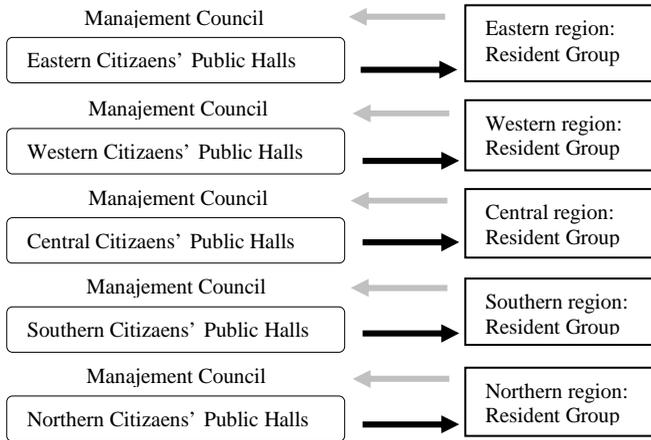


Diagram 2.2 Keberadaan dan kedudukan kominkan
Sumber Akitoshi Teuchi (2006)

Manajemen Kominkan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi sasaran daerah atau region diseluruh wilayah Jepang yang terbagi ke dalam 5 daerah. Jumlah fasilitas untuk kegiatan Kominkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah museum dan perpustakaan yang disediakan untuk fasilitas pendidikan sosial lainnya. Jumlah museum sampai tahun 2004 sebanyak 1000 buah dan perpustakaan (*library*) sebanyak 2500 buah. Jumlah fasilitas gedung untuk pengembangan program-program pendidikan sosial lebih banyak dibanding dengan Sekolah Dasar dan lebih sedikit dari Sekolah Menengah Pertama. Dengan berbagai fasilitas yang dikembangkan, kegiatan-kegiatan pendidikan sosial (pendidikan nonformal) di Jepang jauh lebih maju dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia yang memiliki anggaran jauh dari anggaran pendidikan dasar formal sekalipun. Program-program pendidikan sosial (pendidikan nonformal) di Jepang selalu terpadu dengan

program-program pendidikan sekolah (formal). Perkembangan fasilitas Kominkan yang disediakan pemerintah daerah khususnya legal Kominkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Perkembangan Fasilitas yang Dimiliki Kominkan
dari Tahun 1990 Sampai Tahun 2002

Klasifikasi	1990	1993	1996	1999	2002
Main Buildings	11.005	11.186	11.446	11.418	11.354
Branch Buildings	6.342	6.374	6.373	6.839	6.593
Total	17.347	17.562	17.819	18.257	17.947

Akitoshi TEUCHI, (2006), *Japanese Social Education*.

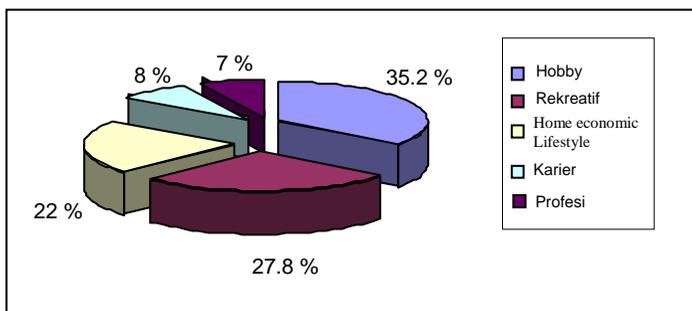
Berbagai program yang dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang difasilitasi Kominkan dan berkaitan dengan pendidikan sosial di antaranya adalah: kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat seperti: keterampilan memasak, saloon (tatarias rambut), workshop teknologi, belajar berdebat dan berpidato, belajar Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris, berbagai keterampilan bermain, menggambar bagi anak-anak, pendidikan kesehatan keluarga dll. Kominkan juga menyiapkan kelas-kelas khusus bagi kursus keterampilan yang terjadwal secara teratur seperti: kursus berdansa, kursus menyiapkan seminar, table manner, upacara minum teh (*tea ceremony/sado*), kursus memainkan alat musik modern, serta privat lainnya. Semua kegiatan tersebut rata-rata sifatnya lebih rekreatif dan penyaluran hoby serta sebagai suplemen saja (pendukung pekerjaan atau pendidikan). Ada pula berbagai kegiatan olah raga yang sifatnya rekreatif, serta kegiatan kunjungan antau study

tour bagi keluarga (masyarakat) untuk mengunjungi berbagai tempat rekreasi atau tempat bersejarah lainnya.

Beberapa kominkan menyediakan model program pelengkap bagi pendidikan formal, hal tersebut diketahui dari beberapa program Kominkan yang menyediakan program pendidikan setara Diploma khusus untuk bahasa asing seperti bahasa Inggris, namun sasarannya kebanyakan ditujukan bagi siswa sekolah formal. Namun demikian kegiatan-kegiatan seperti itu sedikit sekali ditemukan, apalagi kegiatan-kegiatan keterampilan khusus untuk menyiapkan tenaga kerja terampil (*human resources development*) agar lebih profesional, karena program-program seperti itu telah dipersiapkan pemerintah dan pihak swasta (industry) dalam bentuk sistem pendidikan nonformal lainnya baik melalui pusat pelatihan keterampilan, kursus, pusat pengembangan keterampilan, dan pusat-pusat pelatihan lainnya seperti: magang di industri, balai-balai latihan kerja bersertifikat dan program sertifikasi di perguruan tinggi. (Lifelong learning in Japan: 1992, 48)

Berikut ini digambarkan grafik hasil studi deskriptif dan kunjungan ke beberapa kominkan serta beberapa jadwal kegiatan yang diperoleh dari internet tentang berbagai kegiatan yang sifatnya rekreatif (olah raga dan rekreasi), hoby dan kegiatan budaya, dan profesional serta kegiatan tambahan bagi pengembangan ekonomi rumah tangga dan gaya hidup serta pengembangan karir atau tambahan pengalaman bagi peserta atau masyarakat

Grafik. 2.3 Karakter Program yang dikembangkan Kominkan 2006



Sumber: Hasil kunjungan lapangan, download internet, dan laporan hasil penelitian Kominkan

Grafik tersebut menggambarkan, bahwa sebagian besar program yang dikembangkan Kominkan lebih bersifat rekreatif, kesenangan/hoby, gaya hidup dan pengembangan pengetahuan tambahan (keterampilan), sedangkan program yang diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan karier serta profesi sangat terbatas. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan nonformal di Jepang sudah pada kegiatan-kegiatan yang bersifat aktualisasi diri atau pengembangan diri (*self-development*) masyarakat. Di negara-negara berkembang kegiatan-kegiatan ini hanya diikuti oleh masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Kondisi tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal yang dikembangkan di negara-negara berkembang khususnya Indonesia baik melalui PKBM, SKB, kelompok belajar maupun kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal lainnya dengan sasaran utama masyarakat miskin, masyarakat marjinal (terpinggirkan), tidak punya pekerjaan atau masyarakat yang buta huruf, dengan jenis program: Kursus keterampilan, program pemberantasan buta huruf

(*literacy*), program pendidikan kesetaraan (*equivalency program*), peningkatan pendapatan (*income generating*), pembangunan masyarakat dll.

2. Fasilitas perpustakaan (*libraries*)

Berdasar kepada peraturan perpustakaan yang dibuat pada tahun 1951 No.118, perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengoleksi berbagai sumber ilmu pengetahuan khususnya buku, serta merekam berbagai materi yang dibutuhkan, atau membangun dan mengembangkan kembali yang sudah usang sehingga menjadi informasi untuk kepentingan peningkatan kemampuan, dan pengetahuan masyarakat, sehingga perpustakaan berperan dalam membangun kebudayaan, membantu berbagai penelitian, dan sebagai tempat rekreasi masyarakat.

Perannya dalam pendidikan sosial perpustakaan terbagi kedalam dua kategori: a) *public libraries* (perpustakaan masyarakat) dan b) perpustakaan khusus yang dikembangkan oleh lembaga private berdasar pada aturan *Japanese Red Cros* atau lembaga korporasi. Perpustakaan masyarakat (*public*) 90% lebih banyak dari pada perpustakaan *private*.

Peran perpustakaan sangat besar dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan masyarakat dalam rangka mendukung budaya belajar dan budaya membaca. Konsep budaya belajar dan budaya membaca merupakan prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan sosial. Pemerintah Jepang percaya dengan diterapkannya peraturan perpustakaan (*library law*), tanggungjawab pendidikan terutama mencerdaskan bangsa harus dimulai dari pemerintah, khususnya dalam menyediakan infrastruktur pendukung bagi terjadinya proses belajar. Tanpa daya dukung itu masyarakat tidak akan berbuat

banyak dalam memberdayakan dirinya. Budaya belajar dan budaya membaca sebagai bagian dari disiplin dan pengembangan diri (*self development*) masyarakat Jepang terbangun dengan sendirinya ketika pemerintah menyediakan sarana untuk itu.

Cara pandang budaya belajar masyarakat Jepang lebih unik dibanding dengan masyarakat lainnya. Sistem pendidikan di Jepang memberikan kebebasan belajar bagi masyarakat melalui berbagai hal, tanpa dibatasi ruang waktu dan kesempatan, namun kondisi seperti itu harus difasilitasi secara penuh, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Masyarakat bisa belajar di kereta api, di jalan di toko sambil berbelanja dan di semua tempat selalu disediakan tempat untuk memperoleh informasi baru dan membaca dengan nyaman. Keesing & Keesing (1971) mengisyaratkan, bahwa sebagai sistem pengetahuan budaya belajar dapat berfungsi sebagai "pola-pola kelakuan manusia" yang menjadi cetak biru (*blueprint*) atau pedoman hidup yang dianut bersama. Sebagai sebuah pedoman, budaya belajar digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalaman, serta sekaligus menciptakan dan mendorong individu-individu bersangkutan melakukan berbagai tindakan dan pola tindakan yang sesuai dengan kerangka aturan yang telah digariskan.

Dengan dipersiapkannya sarana (fasilitas) belajar yang memadai konsep belajar sepanjang hayat di Jepang sangat kental dan dapat diakses semua orang. Secara konsep kondisi ini menguntungkan karena akan membangun budaya belajar yang utuh. Seperti kita pahami budaya belajar dapat juga dipandang sebagai proses adaptasi manusia dengan lingkungannya, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sistem

pengetahuan belajar digunakan untuk adaptasi dalam kerangka pemenuhan tiga syarat kebutuhan hidup, yakni: (a) syarat dasar alamiah, yang berupa kebutuhan biologis seperti pemenuhan kebutuhan makan, minum, menjaga stamina, menjadikan lebih berfungsi organ-organ tubuh manusia; (b) syarat kejiwaan yakni pemenuhan kebutuhan akan perasaan tenang, jauh dari perasaan-perasaan takut, keterkucilan, kegelisahan dan berbagai kebutuhan kejiwaan lainnya; (c) syarat dasar sosial, yakni kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, dapat melangsungkan hubungan, dapat mempelajari kebudayaa, dapat mempertahankan diri dari serangan musuh, dsb. (Suparlan,1980: Bennet, 1976: 172).

Mengacu kepada pandangan tersebut, sistem nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat khususnya, dapat dikategorikan pada dua kenyataan. Di mana pada satu sisi ada sistem nilai budaya yang menguntungkan bagi terjadinya proses pembangunan dan pada sisi lain ada nilai-sosial budaya yang sama sekali kurang mendukung bagi terjadinya proses pembangunan. Nilai-nilai sosial budaya yang mendukung terjadinya proses pembangunan adalah nilai-nilai sosial budaya yang sangat dipahami baik keberadaannya maupun mekanisme kerjanya, serta tanggungjawab terhadap perkembangan perikehidupan masyarakat. Sedangkan nilai sosial budaya yang tidak mendukung terhadap proses pembangunan, adalah nilai-nilai sosial budaya yang tidak dipahami, akan tetapi hanya dijalankan dan merupakan suatu kebiasaan hidup sehari-hari yang berlaku dalam kelompoknya. Nilai-nilai sosial budaya ini biasanya bukan merupakan sesuatu hal yang terjadi secara turun temurun dan merupakan aturan (norma), akan tetapi nilai-nilai yang sama sekali dibentuk oleh sekelompok orang agar masyarakat (penduduk) tetap taat akan pola hidupnya, dan nilai sosial budaya semacam

ini hanya menguntungkan sekelompok orang saja. Akan tetapi karena nilai-nilai tersebut sudah terpatrit dalam perikehidupan masyarakat (penduduk), maka tingkat kebenarannya dan kepercayaannya tetap dihargai. Koentjaraningrat pada konsep kebudayaan ke lima mengatakan bahwa: ada kebudayaan-kebudayaan yang amat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Dalam pola kelakuannya, manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan serupa itu akan berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior, atau orang-orang atasan. Kebudayaan lain lebih mementingkan hubungan horisontal antara manusia dengan sesamanya. (Koentjaraningrat 1987: 29-30)

Sejalan dengan arah perkembangan manusia dan perkembangan zaman, nilai-nilai sosial budaya manusia terus berkembang dan berubah pula. Modernisasi kehidupan mendorong manusia untuk mampu menyesuaikan diri pada nilai-nilai sosial budaya mana yang mampu mengangkat kehidupannya. Perubahan-perubahan tersebut tampak nyata dari kaidah nilai-nilai budaya tradisional menjadi nilai-nilai budaya modern.

Memahami akan pentingnya perubahan dengan cepat, maka sistem social budaya belajar yang dibentuk adalah berdasar pada nilai-nilai budaya yang disadari menguntungkan bagi proses pembangunan dan perubahan. Maka faktor ini yang dijadikan landasan bagi pembangunan pendidikan masyarakat Jepang Saat ini. Dengan kesadaran tersebut Pemerintah melalui berbagai aturan-aturan pendidikan yang diberlakukan mencoba memfasilitasi kebutuhan belajar masyarakat dari berbagai aspek kebutuhan. Daya dukung utama yang dianggap dapat menumbuhkan budaya belajar ditengah-tengah masyarakat adalah perpustakaan masyarakat.

Fasilitas perpustakaan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya kebutuhan belajar masyarakat. Perpustakaan tidak hanya dilengkapi dengan buku-buku dan sumber informasi dalam bentuk cetak, akan tetapi hampir semua perpustakaan dilengkapi dengan system teknologi komunikasi berbasis computer. Sehingga para pembaca mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya dari buku dan sejenisnya, akan tetapi dapat diperoleh melalui teknologi komputer yang terakses ke berbagai penjuru dunia (antar perpustakaan dll).

Jumlah perpustakaan yang dibangun pemerintah Jepang dan lembaga-lembaga lain sampai saat ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Perpustakaan di seluruh Jepang

Klasifikasi	Total	Prefecture	City	Town	Village	Union	Corporation
1990	1.950	70	1.275	521	48	3	33
1993	2.172	66	1.392	619	59	2	34
1996	2.396	66	1.473	745	74	5	33
1999	2.592	65	1.548	856	89	3	31
2002	2.742	64	1.616	927	99	8	28
Main Building	2.040	55	947	904	99	7	28
Branch	702	9	669	23		1	

Sumber: Akitoshi Teuchi CRICED (2006)

Perpustakaan juga dilengkapi dengan perpustakaan kunjung (menggunakan mobil) yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi modern. Setiap mobil perpustakaan kunjung secara terjadwal akan mengunjungi berbagai sekolah. Setiap mobil hampir dilengkapi 3000 buku dengan berbagai variasi judul sesuai kebutuhan tingkat pendidikan, buku yang disediakan semuanya dioperasikan melalui computer.

3. Fasilitas Museum

Salah satu ciri khas pengembangan pendidikan sosial (*social education*) adalah tersedianya fasilitas Museum. Museum merupakan faktor utama dalam menunjang pengembangan pendidikan sosial di Jepang. Pengelolaan Museum dilandasi oleh aturan tentang kemuseuman yang diterbitkan tahun 1951, No.285. Pengembangan Museum dimaksudkan untuk mengoleksi berbagai material yang berkaitan dengan sejarah, seni, folklore (ceritera masyarakat Jepang), industry dan perkembangan ilmu pengetahuan alam, sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat sebagai pengetahuan dan penunjang pendidikan. Disamping itu pula Museum berguna untuk pengembangan budaya masyarakat local, penelitian dan tempat rekreasi bagi masyarakat, juga Museum dipersiapkan sebagai tempat penelitian terhadap koleksi yang ada.

Museum didirikan di seluruh wilayah Jepang oleh pemerintah kota maupun oleh lembaga swasta (private). Di seluruh wilayah Jepang jumlah Museum yang ada sampai saat ini adalah 1.117 Museum. Jenis dan kegunaan Museum sangat berbeda ada *comprehensive Museum*, *science Museum*, *history Museum*, *gallery* dan Museum lainnya. Keberadaan Museum sebagai fasilitas pendidikan sosial, memberi kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan program pendidikan nonformal, variasi program yang dikembangkan menjadikan kegiatan-kegiatan pendidikan sosial semakin hidup. Masyarakat yang datang ke Museum tidak hanya disuguhkan program-program akademik akan tetapi juga akan menerima berbagai program yang sifatnya rekreatif, spiritual dan alami (natural). Mereka bisa belajar seni tradisional, masakan tradisional, dan budaya-budaya tradisional

masyarakat Jepang yang sudah berabad-abad lamanya. Dengan Museum masyarakat Jepang tetap taat terhadap budaya leluhur dan tetap menghormati berbagai budaya yang dilahirkan nenek moyangnya. Namun demikian meskipun masyarakat tetap mencintai adat dan budaya lama akan tetapi kemajuan teknologi dan modernisasi di berbagai bidang tetap menjadi pegangan perubahan dan perkembangan masyarakat Jepang. Data tentang Museum dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Museum yang ada di seluruh Jepang

Classification	Total	National	IAI *)	Public	Private
1990	799	28		387	384
1993	861	28		423	410
1996	985	29		518	438
1999	1.045	26		549	470
2002	1.117	21	10	608	478
Comprehensive Museum	141				
Science Museum	102				
History Museum	382				
Gallery	381				
Others	111				

*) Independent Administrative Institution

Sumber: Akitoshi Teuchi CRICED (2006)

Museum yang disediakan pemerintah maupun organisasi private lainnya bukan hanya Museum tentang budaya dan sejarah akan tetapi juga disediakan Museum yang komprehensif dan Museum ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Berbagai kegiatan yang dikembangkan Museum bukan hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan menerima kunjungan (observasi) akan tetapi disediakan juga tempat-tempat khusus untuk pendidikan dan pembelajaran tentang berbagai materi yang disediakan tutor, kegiatan-kegiatan workshop, seminar, training course, observasi lapangan, kursus keterampilan alat-alat tradisional dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat

meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat (pengunjung). Berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan alam baik pemahaman tentang alam maupun pemeliharannya, secara terjadwal diprogramkan oleh petugas Museum, program ini diberikan agar masyarakat lebih mencintai dan menghargai alam bagi hidup dan penghidupannya, terutama bagi generasi masa depan. Program-program yang dikembangkan Museum selalu mendatangkan keynote speech (pembicara) dari berbagai ahli dan difasilitasi oleh tutor atau fasilitator Museum.

4. Fasilitas pendidikan sosial bagi kegiatan pemuda dan anak-anak (pusat pengembangan generasi muda dan anak)

Model fasilitas gedung yang disediakan dalam pendidikan sosial bagi anak-anak dan pemuda sangat berbeda, ini menandakan, bahwa pemerintah Jepang memahami betul program yang harus dikembangkan dan dibutuhkan anak dan pemuda, sehingga fasilitas belajar bagi keduanya sangat berbeda meskipun dalam gedung yang sama. Pengembangan fasilitas program bagi pemuda dan anak-anak sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1959, namun perkembangan yang sangat pesat terjadi setelah tahun 1970-an.

Pusat pengembangan pemuda atau di Indonesia dikenal dengan gelanggang generasi muda pertamakali didirikan tahun 1959 di daerah Gotenba Shizuoka, sedangkan gedung pusat aktivitas anak-anak nasional dibangun pertama kali di Muroto Kochi pada tahun 1975. Sejak saat itu perkembangan gedung pusat pengembangan kegiatan pemuda dan anak-anak maju begitu pesat.

Berbagai program kegiatan dikembangkan pusat pengembangan pemuda dan anak-anak (GGM) untuk

meningkatkan apresiasi pemuda dan anak-anak terhadap budaya, kesenian, seni lukis, *study tour*, naik gunung, olah raga panjat tebing, serta olah raga lain baik yang rekreatif maupun prestasi. Juga berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan kreativitas anak-anak dan pemuda dikembangkan di pusat kegiatan ini seperti: pertemuan pagi, *out door cooking dan candle performace* dll. Fasilitas gedung tersebut dilengkapi dengan berbagai alat kebutuhan pengembangan program: seperti ruangan lokakarya (*workshop*), ruang makan, dan berbagai fasilitas lain baik untuk kegiatan di luar maupun kegiatan di dalam (*in door dan out door*).

Seperti diuraikan pada pembahasan awal, bahwa kegiatan pendidikan nonformal (*social education*) di Jepang lebih diarahkan pada program-program yang bersifat complementer dan suplementer bagi pendidikan formal. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di pusat pengembangan pemuda dan anak-anak sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di Taman Kanak-Kanak maupun sekolah, akan tetapi sifat karakter program tetap menyatu dengan program-program yang dikembangkan pada pendidikan sekolah formal terpadu.

Di samping itu pula program yang dikembangkan pendidikan formal dan nonformal saling mengisi satu sama lain, sehingga pemahaman dan kemampuan anak-anak dan pemuda betul-betul utuh. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan anak, pada saat ini program-program yang dikembangkan tidak hanya diarahkan bagi anak-anak akan tetapi juga bagi ibu-ibunya, terutama ibu-ibu muda. Berbagai program bagi ibu-ibu muda telah mendapat respon positif dari pemerintah Jepang, pemerintah Kota dan masyarakat luas. Program yang dikembangkan di antaranya melalui: *workshop*,

seminar, pelatihan, serta berbagai bimbingan kehidupan keluarga lainnya.

Dengan tingginya minat masyarakat terhadap pengembangan program pemuda dan anak-anak, maka fasilitas pusat pengembangan pemuda dan anak-anak untuk pelayanan program terus ditingkatkan, di samping itu pula jumlah pusat pengembangan pemuda dan anak-anak terus berkembang, karena berbagai program dikembangkan tidak hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan rekreatif akan tetapi juga berbagai kegiatan akademik dan non akademik seperti kegiatan: peningkatan bahasa asing dan Bahasa Jepang, pengembangan cara berorganisasi, korespondensi, bimbingan belajar dll. Berikut ini di gambarkan perkembangan fasilitas pemuda dan anak-anak dalam table berikut:

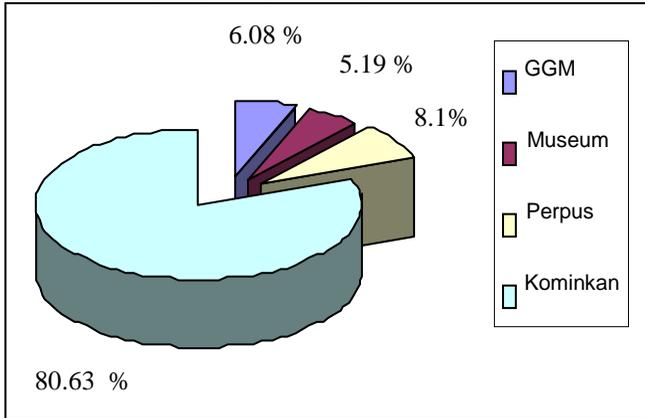
Tabel 2.4
Jumlah Fasilitas Kepemudaan dan Anak-anak

Classification	Total	Children's Natural House	House for youth	House for youth (day care)	Cultural cenmtrre for school children	Others
1990	1.154	278	254	168	61	393
1993	1.225	294	249	162	71	449
1996	1.319	304	248	161	99	507
1999	1.263	311	229	176	75	472
2002	1.307	326	223	171	105	482
Prefectures	213	106	78	5		24
Cities or Wards	735	162	91	119	94	269
Towns and villages	346	53	47	47	11	188
Associations	13	5	7			1

Sumber : Akitoshi Teuchi CRICED (2006)

Berikut ini digambarkan secara utuh tentang perbandingan jumlah fasilitas pendidikan sosial yang dikembangkan pemerintah kota di Jepang sampai dengan tahun 2006.

Grafik 2.3 Perbandingan Fasilitas Pendidikan Sosial di Jepang Sampai dengan Tahun 2006



Sumber: disarikan dari Educational System and Practice in Japan (2006)

Dari grafik tersebut nampak bahwa fasilitas pendidikan sosial khususnya Kominkan (*Citizens' Public Halls*) jauh lebih banyak dibandingkan dengan fasilitas pendidikan sosial lainnya baik dengan perpustakaan, pusat pengembangan generasi muda dan anak-anak, maupun museum.

Dengan data tersebut menunjukkan, bahwa kualitas pendidikan nonformal dalam bentuk kegiatan belajar masyarakat dan pusat budaya mendapat perhatian khusus baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah Kominkan, perpustakaan, museum dan pusat pengembangan generasi muda dan anak-anak dari tahun ke tahun. Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun pemerintah kota bukan hanya diarahkan untuk melayani kebutuhan pendidikan sosial saja (khususnya Kominkan) akan tetapi juga diperuntukkan bagi melayani sistem pendidikan formal (sekolah).

Diagram pengembangan Pendidikan sosial melalui berbagai program kegiatannya di gambarkan berikut ini:

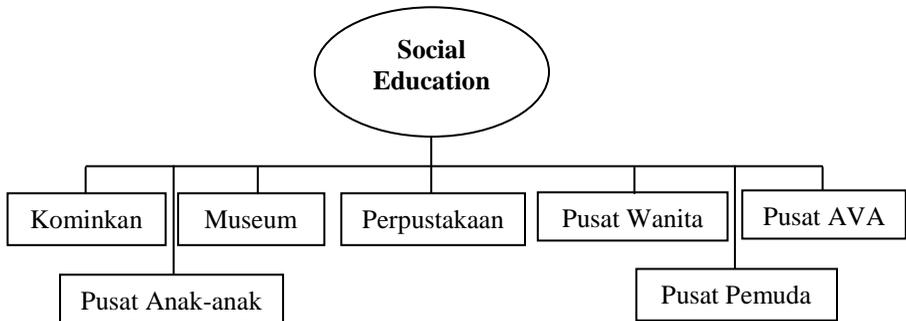
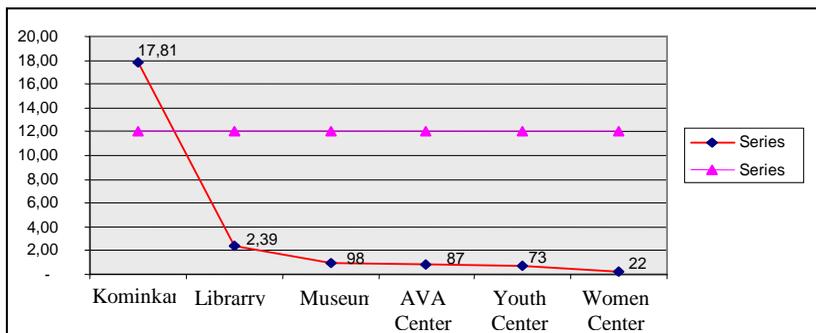


Diagram 2.3 Fasilitas Social Education

Sumber : disarikan dari beberapa sumber bacaan tentang Pendidikan Sosial

Secara jelas perbandingan jumlah legal kominkan dengan fasilitas pendidikan sosial lainnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik. 2.4. Jumlah Fasilitas Pendidikan Sosial



Resources: The facilities of social education (2005)

H. Karakteristik program dan jenis program kominkan

Meskipun secara umum sudah dijelaskan pada bagian awal laporan ini tentang karakteristik dan jenis program yang dikembangkan Kominkan, namun pembahasan terdahulu merupakan gambaran global tentang program Kominkan. Seperti halnya program-program pendidikan nonformal lainnya, penyusunan program selalu berbasis kebutuhan masyarakat (warga belajar/masyarakat), begitu pula dengan pengembangan dan penyusunan program Kominkan. Ada tiga jenis program utama yang dikembangkan Kominkan saat ini:

1. Kegiatan berbasis masyarakat (*community-based activities*). Kegiatan-kegiatan Kominkan dibangun berdasar pada situasi daerah dan berbasis kehidupan aktual masyarakat, sehingga masyarakat bisa masuk ke Kominkan dengan bebas. Sarana dan perlengkapan disediakan dengan lengkap untuk memudahkan berbagai kegiatan di Kominkan, baik kegiatan organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu (daerah).
2. Kegiatan pemuda dan anak-anak, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok masyarakat lokal tertentu khususnya para pemuda dan anak-anak (seperti asosiasi pemuda, asosiasi wanita).
3. Kominkan menawarkan berbagai mata pelajaran untuk memenuhi minat dan meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya pemuda dan anak-anak masyarakat setempat. Kominkan mendukung sepenuhnya kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, di samping itu pula Kominkan meminjamkan berbagai dokumen serta sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar, juga berbagai peralatan untuk kegiatan olah raga,

rekreasi, seni dan budaya serta berbagai alat keterampilan lainnya.

4. Membangun jaringan antar masyarakat lokal. (*local networking activities*)
5. Kominkan menghubungkan dan mengkoordinasi berbagai organisasi dan kelompok masyarakat, serta mengatur berbagai kegiatan bersama dengan pendidikan formal khususnya sekolah. Kominkan juga memperkenalkan dan memanfaatkan para pemimpin dan para profesional masyarakat setempat, untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

Dari ketiga karakteristik tersebut dapat disimpulkan beberapa aspek, di mana aspek-aspek tersebut merupakan ciri khas tersendiri bagi program-program yang dikembangkan Kominkan. Aspek-aspek tersebut meliputi: *Aspek pertama*, adalah membangun hubungan kerjasama antara pihak Kominkan dengan peserta didik atau masyarakat. Pada kondisi ini pendekatan dan pengembangan program dibangun melalui sebuah pola komunikasi yang intensif antara peserta didik, antara peserta didik dengan Kominkan khususnya pelatih, tutor atau pembimbing. Pola ini dibangun melalui pendekatan pembelajaran kelompok dan tugas-tugas kelompok. Model pengembangan program ini ditawarkan kepada peserta didik agar terjadi sebuah proses belajar masyarakat yang menyatu (*Mutual Learning Society*), dengan model ini diharapkan peserta didik mampu menentukan dan menetapkan materi program secara mandiri, mampu belajar secara mandiri yang pada akhirnya mampu mengembangkan program secara mandiri. Tujuannya adalah agar pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan gagasan, dan karakter individu, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai peserta didik yang berbeda. Dengan kata lain pengembangan program lebih mengarah pada pendekatan bottom-up (pendekatan datang dari keinginan dan minat masyarakat sebagai peserta

didik), atau tidak dilakukan secara top-down di mana pengembangan program diatur oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Di samping itu pula program yang dikembangkan merupakan hasil diskusi di antara anggota masyarakat dalam kelompoknya.

Aspek kedua, adalah hasil program (output program) pembelajaran tidak hanya dikembalikan kepada peserta didik (individu) masing-masing, akan tetapi dikembalikan lagi kepada masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar hasil dari program Kominkan yang dikembalikan kepada masyarakat dapat menguntungkan kebudayaan dan masyarakat setempat, serta dapat membantu meningkatkan kemajuan masyarakat.

Salah satu contoh yang dapat diambil di antaranya tentang program keahlian (keterampilan) menciptakan program *website* internet bagi peserta didik. Dalam program ini peserta didik tidak hanya mempelajari keahlian menciptakan *website* internet di Kominkan, akan tetapi peserta didik dituntut untuk mampu mengembangkan program tersebut di daerahnya (masyarakatnya) masing-masing.

Dengan program ini diharapkan masyarakat tertarik dan berminat untuk mengembangkan *website* di daerahnya masing-masing dalam rangka menyebar luaskan informasi tentang daerahnya atau membuat jaringan kegiatan daerahnya agar diketahui oleh daerah yang lain, yang pada akhirnya peserta didik sendiri yang akan memimpin masyarakatnya. Dengan model ini, program-program yang dikembangkan Kominkan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam rangka memajukan masyarakat serta berperan dalam membangun masyarakat di masa depan.

Kesimpulannya, atau sebagai aspek akhir adalah, program yang dikembangkan di Kominkan mampu membangun dan mengembangkan sebuah model program yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik melalui belajar mandiri yang pada akhirnya dapat melahirkan orang-orang

(warga masyarakat) yang terampil dan cakap dalam membangun dan mengembangkan daerahnya atau masyarakatnya sendiri.

Kesimpulan tersebut seperti dijelaskan dalam publikasi “Situasi Ideal dan indikator Mutakhir Kominkan” yang dibuat oleh Asosiasi Nasional Kominkan tahun 1965; bahwa sasaran pokok tujuan dan asas Kominkan adalah “*mengembangkan kemampuan masyarakat dalam membangun daerahnya secara mandiri*”. Tujuan dan asas tersebut menempatkan Kominkan sebagai tempat dan pusat pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kemampuan membangun diri sehingga mampu mengambil alih pembangunan daerahnya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan tiga jenis program utama Kominkan tersebut atau program-program utama yang dikembangkan berhasil sesuai asas yang ditetapkan, ada beberapa strategi dasar yang menjadi patokan dalam pengembangannya. Strategi-strategi tersebut meliputi: 1) merencanakan program kegiatan, 2) melakukan sosialisasi program, 3) rekrutment sasaran/peserta didik (warga belajar), 4) merancang dan menetapkan berbagai sumber (sumberdaya manusia, sumberdaya material maupun financial), 5) menganalisis dan menetapkan kebutuhan peserta didik, 6) menyusun materi program yang akan dikembangkan, 7) melaksanakan (merealisasikan) program, 8) melakukan monitoring dan evaluasi, dan 9) pengendalian serta pengembangan program. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dalam pengembangan program tersebut secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

1. Merencanakan program kegiatan

Ada dua jenis program yang dikembangkan kominkan: a) program baku (*permanent*) yang dilakukan secara reguler, dan c) program insidental atau program paruh waktu (*part time*).

Program permanent yang dilakukan secara reguler adalah jenis program wajib atau merupakan kegiatan pokok yang selalu dilakukan oleh Kominkan dalam mengembangkan pendidikan sosial. Beberapa ciri program permanent di antaranya adalah: a) Program ini biasanya direncanakan satu tahun sekali dan ditinjau ulang ketika program tersebut selesai, apakah masih layak dikembangkan atau diganti dengan jenis program yang lain atau mendapat beberapa perbaikan, b) program permanent direncanakan secara khusus oleh Kominkan dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat atau ditawarkan, dalam merencanakan program dilakukan melalui kajian yang sangat matang, agar program sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mendapat respon positif dari masyarakat, c) program permanent diikuti oleh warga masyarakat yang memiliki kriteria tertentu serta memiliki daftar khusus.

Jenis program reguler adalah program-program: a) kursus dan latihan bersertifikasi (Diploma), seperti kursus bagi kelompok pemuda, orang dewasa dan pengembangan karier, b) kegiatan olah raga yang dilakukan secara rutin seperti kegiatan senam-senam khusus, serta kegiatan olahraga yang bersifat rekreatif lainnya, c) Kegiatan-kegiatan kursus bahasa atau mata pelajaran sekolah bagi siswa sekolah, seperti kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa asing lainnya, d) Juga program-program lain yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan masyarakat seperti; pertanian, ekonomi dan bisnis, keterampilan (khusus) memasak (tata boga), pembuatan keramik, pelatihan petugas sukarelawan di daerah serta kegiatan lifestyle lainnya seperti sado dll.

Program insidental atau paruh waktu (*part time*) adalah program yang rencana pengembangannya disesuaikan dengan permintaan masyarakat sasaran,

program, ini kadang-kadang hanya dilakukan satu minggu satu kali, satu bulan satu kali atau dalam satu tahun hanya dilakukan 2 atau 3 kali saja. Jadwal kegiatannya pun tidak ketat seperti jadwal untuk kegiatan program reguler. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dalam program reguler adalah rekreasi, program-program olahraga dan kesehatan, pengembangan seni dan budaya tradisional, pengembangan seni modern, kegiatan study tour, upacara-upacara tradisional, praktek-praktek pembangunan masyarakat desa melalui pengabdian seperti: melakukan kebersihan lingkungan, olah raga bersama masyarakat non Kominkan, serta kegiatan lain yang bersifat rekreatif dan penyaluran hobby lainnya.

Program ini biasanya diberikan kepada sasaran dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti kelompok masyarakat usia lanjut, kelompok para profesional muda, kelompok ibu-ibu muda, kelompok-kelompok keluarga muda, kelompok pemuda dan anak-anak sekolah, kelompok orang dewasa dan lain-lain. Kegiatannya biasa dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, atau diskusi. Materi yang dibahas untuk kelompok usia lanjut meliputi; cara menjaga kesehatan, olah raga sederhana, rekreasi dll. Untuk kelompok professional materi kegiatannya meliputi: menghilangkan stress, pengembangan karier, menjaga tetap sehat dll. Sedangkan untuk kelompok ibu-ibu muda materi yang dibahas meliputi, cara merawat bayi, menjaga kesehatan, dan masalah kerumah tanggaan, untuk kelompok rumah tangga kegiatannya meliputi; cara memasak yang higienis, menata, menjaga dan merawat bunga atau tanaman, cara mengembangkan dan mendidik anak melalui bermain dansa dll. Serta berbagai kegiatan lain bagi kelompok usia-usia tertentu (anakmuda, siswa sekolah dll)

Untuk program-program yang berskala besar atau memerlukan keynote speech (pembicara dari luar), atau jenis-jenis program pengembangan karier dan kegiatan-kegiatan yang bersertifikat (diploma) biasanya dibahas oleh tim pakar yang secara khusus didatangkan dari perguruan tinggi atau lembaga yang kompeten dibidang materi (program) yang akan dibangun. Kominkan juga melakukan kerjasama dengan pihak industri, lembaga-lembaga private (swasta) dalam bentuk kemitraan.

Untuk pengembangan model program yang seperti itu, strategi yang dikembangkan dibicarakan dan didiskusikan dengan sangat hati-hati serta melalui tahapan kegiatan yang sangat ketat. Tahapan-tahapan tersebut dilihat dari: daya dukung terhadap pelaksanaan program (fasilitas yang tersedia) output program dan dampak program bagi peserta dan bagi masyarakat. Banyak sekali program yang dikembangkan Kominkan ditolak oleh komisi khusus analisis program, karena program yang dikembangkan tidak sesuai dan tidak menguntungkan sasaran (masyarakat), pemerintah maupun Kominkan.

2. Melakukan sosialisasi program

Sosialisasi program dilakukan setelah program direncanakan dengan matang serta dikaji oleh berbagai pihak yang bertanggungjawab terhadap program. Setelah program dikaji dan dinyatakan memenuhi syarat, maka program tersebut ditawarkan kepada seluruh masyarakat melalui berbagai model atau cara, seperti: melalui jaringan internet, program televisi, radio, surat kabar, pamflet dan jurnal serta majalah Kominkan yang biasa diakses oleh masyarakat lokal, atau pengumuman di Kominkan.

Pada saat sosialisasi program, jumlah peminat atau masyarakat yang akan ikut serta dalam kegiatan sudah dapat diprediksi jumlah peminatnya, karena ketika

sosialisasi dilakukan melalui internet atau melalui media lainnya biasanya disediakan formulir pendaftaran sementara secara khusus. Oleh karena itu pengembang program di Kominkan sudah dapat memprediksi kelangsungan kegiatan selanjutnya.



Diagram 2.4 Model Jaringan Kominkan
www.Kominkan.or.jp/publishing

3. Rekrutment sasaran/peserta didik (warga belajar)

Seperti diuraikan pada tahap sosialisasi program, rekrutmen peserta sudah dilakukan secara langsung ketika program ditawarkan (disosialisasikan) melalui media internet, karena pada saat itu petugas sudah dapat mencatat berapa jumlah peserta yang mendaftar. Di samping itu pula disediakan formulir untuk daftar ulang melalui internet atau melalui telepon dan media lainnya atau datang langsung ke Kominkan. Hasil survey menunjukkan bahwa kebanyakan calon peserta datang langsung ke Kominkan untuk melakukan pendaftaran ulang. Rekrutmen peserta sangat mudah sekali dilakukan, karena budaya masyarakat Jepang yang sangat patuh dan selalu mengikuti aturan yang baku, disiplin dan dapat dipercaya. Jarang sekali

calon pendaftar yang menggagalkan keikut sertaannya. Kalaupun masyarakat tidak berminat, dia sama sekali tidak akan coba-coba untuk mengisi formulir. Oleh karena itu proses sosialisasi program dan kualitas program betul-betul menjadi perhatian warga masyarakat atau calon peserta. Karena pertanyaan secara bertubi-tubi dari calon peserta akan diperoleh petugas ketika sosialisasi program. Calon peserta akan menanyakan berbagai hal dengan program yang ditawarkan seperti: dampak program, kualitas pembicara, sarana pendukung, materi penunjang, jadwal kegiatan, biaya yang dibutuhkan dari awal sampai akhir secara terperinci, peta kegiatan dll. Beberapa contoh program yang ditawarkan dapat dilihat pada laporan studi komparatif ini.

4. Merancang dan menetapkan berbagai sumber (sumberdaya manusia, sumberdaya material maupun financial)

Seperti diketahui, bahwa kegiatan Kominkan sangat berbasis fasilitas, hal ini sangat benar karena semua program pokok yang ditawarkan didukung oleh fasilitas yang sangat lengkap dan memadai. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam merancang dan menetapkan sumber-sumber yaitu: a) mengkaji atau menganalisis jenis program yang akan dikembangkan, b) melihat dan menganalisis kemampuan/kualitas atau sumber-sumber yang tersedia di Kominkan, c) menganalisis keuntungan dan kerugian pengembangan program jika sumberdaya yang dibutuhkan program kurang lengkap tidak tersedia (biasanya terjadi pada program-program yang secara tiba-tiba diminata oleh pihak ketiga atau masyarakat), d) pihak-pihak mana saja yang bisa diminta bantuan untuk mendukung program, dan e) menganalisis dampak

terhadap pengembangan Kominkan dan pengembangan program selanjutnya.

Tahapan-tahapan tersebut selalu dilakukan dengan sangat baik dan merupakan prosedur standar Kominkan dalam merancang dan dalam menetapkan sumberdaya pendukung program. Sehingga ketika program digulirkan tak ada istilah kekurangan biaya, fasilitator (pembicara, tutor, pelatih) tidak hadir, atau kekurangan bahan materi dll. Di samping itu pula karena sistem pendidikan sosial di Jepang sudah terintegrasi, maka setiap program yang dibutuhkan masyarakat biasanya selalu terlayani dengan baik serta mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah kota, asosiasi, sekolah, universitas, lembaga-lembaga sosial, atau lembaga komersial lainnya.

5. Menganalisis dan menetapkan kebutuhan peserta didik (warga belajar)

Seperti halnya dalam menganalisis kebutuhan PKBM atau menganalisis kebutuhan-kebutuhan belajar pada kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal lainnya. Kebutuhan peserta didik (warga belajar) Kominkan memiliki model yang sama, hanya alat dan strategi yang digunakan sudah lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Meskipun demikian ada jenis-jenis analisis kebutuhan melalui instrument khusus yang disediakan di setiap kominkan. Menganalisis dan menetapkan kebutuhan belajar (kegiatan) di Kominkan diidentifikasi melalui pendekatan individual dan pendekatan kelompok sasaran. Identifikasi individual dilakukan melalui penyebaran instrument atau angket baik melalui internet atau selebaran khusus yang dibagikan ketika peserta sudah hadir di Kominkan. Penetapan kebutuhan seperti ini dilakukan bagi kegiatan-kegiatan khusus seperti: kegiatan kursus, pelatihan, private dll, terutama dalam penetapan jadwal

serta materi kegiatan. Sedangkan pendekatan kelompok dilakukan bagi sasaran didik yang dianggap kebutuhan belajarnya homogen (sama) seperti ibu-ibu rumah tangga muda, kelompok manula, kelompok hoby, kelompok masyarakat pencinta kesenian tradisional, kelompok masyarakat pencinta alam dll. Kegiatannyapun biasanya kegiatan yang bersifat insidental atau sesaat.

Identifikasi kebutuhan lainnya dilakukan melalui identifikasi kebutuhan belajar yang diduga dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Identifikasi kebutuhannya dilakukan melalui iklan atau selebaran yang dibagikan ke masyarakat. Penetapan kebutuhan dilakukan setelah mendapat respon dari calon peserta didik (warga belajar), melalui analisis yang dilakukan tim khusus pengembang program.

6. Menyusun materi program

Materi program disusun berdasar kepada kebutuhan sasaran atau warga belajar, dalam penyusunan materi program, ketika survey dilakukan tidak ditemukan data tentang penyusunan materi yang disusun bersama antara pihak tutor, fasilitator dengan peserta didik (warga belajar). Dalam menyusun materi Kominkan menetapkan tim khusus yang terdiri dari pengembang program, tutor, pelatih, fasilitator atau pembimbing dan pembina program (staff dan supervisor). Namun demikian kehati-hatian dalam penyusunan materi program sangat menjadi acuan Kominkan.

Disamping itu pula beberapa program kegiatan disusun secara langsung oleh tutor/fasilitator dan tidak melibatkan pihak (staff) Kominkan. Tutor, fasilitator atau peltih (trainer) hanya mendaftarkan dan meminta ijin untuk menyelenggarakan kegiatan di Kominan. Berikut ini digambarkan beberapa contoh program kegiatan serta

materi kegiatan yang di kembangkan di Kominkan berdasarkan hasil observasi ke lapangan dan diperoleh dari laporan beberapa kegiatan hasil penelitian lainnya.

Tabel. 2.5
Contoh: Jenis dan Materi Program Kominkan 2006

No.	Nama Kominkan	Jenis Program Kegiatan	Materi	Jumlah Peserta didik/waktu
1	Oho Kominkan	Cara menggunakan computer pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Cara menggunakan mouse • Bagaimana input karakter computer • Bagaimana membangun kalimat • Menyiapkan computer pribadi 	20 oarang Waktu kegiatan 9 kali pertemuan
		Satu, dua, tiga bersama ibu dan anak (ibu dan anak balita)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan anak melalui kegiatan bermain bersama (dancing and playing with friends) • Mari diet (untuk ibu) 	30 peserta 6 kali pertemuan
		Tenis meja	<ul style="list-style-type: none"> • Mari bermain tenis meja bagi pemula 	20 peserta 8 kali pertemuan (Gratis)
		Seni Menata bunga	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dan merawat bunga untuk berbagai kegiatan agar tidak cepat layu 	20 peserta 5 kali pertemuan
2	Yoshinuma Kominkan	Menjaga kesehatan agar awet muda	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kesehatan agar tetap awet muda melalui caha hidup sehat • Menjaga badan tetap buga 	20 peserta 7 kali pertemuan
		Menata bunga (the manner of the ohara)	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar menata bunga ala Jepang (untuk pemula) 	15 orang 6 kali pertemuan
		Cara menggunakan kimono	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pemula, memulai cara menggunakan pakaian Yukata, 	20 peserta 10 kali pertemuan
		Menata bunga	<ul style="list-style-type: none"> • Merawat bunga agar tidag cepat layu dan mati • Menyiapkan bahan dan alat-alat 	20 peserta 5 kali pertemuan

No.	Nama Kominkan	Jenis Program Kegiatan	Materi	Jumlah Peserta didik/waktu
			perawatan bunga	

3	Toyosato	Origami	<ul style="list-style-type: none"> Membuat ornamen dari origami 	20 peserta 10 kali pertemuan
		Beginner's Bussiness English	<ul style="list-style-type: none"> Belajar bagaimana memperkenalkan diri dan perusahaan Bagaimana menulis surat bisnis dalam Bahasa Inggris dan mengirim e-mails 	30 peserta 10 kali pertemuan
		Power Yoga	<ul style="list-style-type: none"> Cara bernafas Berlatih menguatkan otot. Yoga efektif bagi diet 	20 peserta 10 kali pertemuan
		Abacus dan mental arithmatik	<ul style="list-style-type: none"> Menstimulasi otak kiri dengan abacus dan otak kanan dengan arithmatik Untuk meningkatkan memory otak 	14 peserta 10 kali pertemuan
4	Kasuga Kominkan	Cooking for detoxification	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan detoxify untuk asimilasi nutrisi secara efektif , dengan penggunaan beras dan sayuran 	15 peserta 3 kali pertemuan
		Chinese Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> Belajar dan berlatih china hygiene "Kikoh" 	30 peserta 8 kali pertemuan
		Bagaimana memakai Kimono	<ul style="list-style-type: none"> Belajar bagaimana memakai Kimono (The basic to wear Kimono) 	20 peserta 9 kali pertemuan
		Menjaga anak	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana menyikat gigi balita (bayi) Bagaimana membaca buku Bagaimana menyiapkan makanan untuk balita (bayi) 	25 peserta 5 kali pertemuan
		Bahasa Korea	<ul style="list-style-type: none"> Pengantar bahasa untuk pemula 	20 peserta 8 kali pertemuan
		Bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan dasar berbahasa Mengenal karakter Bahasa Indonesia 	15 orang Setiap hari senin

No.	Nama Kominkan	Jenis Program Kegiatan	Materi	Jumlah Peserta didik/waktu
5	Yatabe Kominkan	Pengantar berkebun	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan tanah • Menyiapkan pupuk • Bagaimana menjaga tanaman • Merubah pot dan memangkask tanaman 	20 peserta 5 kali pertemuan
		Cara menggunakan personal komputer	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana cara menggunakan PC yang benar • Bagaimana memasukkan karakter komputer • Bagaimana menggunakan microsoft word dan excel • Menyiapkan PC windows secara individual 	20 peserta 4 kali pertemuan
		Cara membuat Pizza (untuk anak SD dan keluarga)	<ul style="list-style-type: none"> • Mari kita membuat Pizza di rumah, murah dan enak 	12 peserta 1 kali pertemuan
		Italian Home Cooking (pizza dan pasta)	<ul style="list-style-type: none"> • Mari menyiapkan makanan ala itali dengan bahan-bahan yang ada 	24 peserta 4 kali pertemuan
		Tindakan darurat apabila terjadi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pertolongan pertama bagi orang yang terbakar • Berlatih menangani kebakaran 	30 peserta 2 kali pertemuan
		Anda adalah pustakawan	<ul style="list-style-type: none"> • Berlatih menjadi pustakwan 	4 orang 1 kali pertemuan
6	Sunami Kominkan	Menulis buku dan peta daerah yang dilakukan bersama Kominkan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis buku untuk tiap-tiap daerah sasaran kegiatan Kominkan, terutama tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Festival - Heritage - Upacara tradisional - Nama-nama kampung - Ceritera tentang pertanian 	Melahirkan 12 buku (12 daerah kegiatan)

No.	Nama Kominkan	Jenis Program Kegiatan	Materi	Jumlah Peserta didik/waktu
			<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga hutan - Kondisi dan keadaan petani dll • Membuat Peta wisata, daerah-daerah penting di sekitar wilayah Sunami 	
		Pengantar berkebun	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan tanah • Menyiapkan pupuk • Bagaimana menjaga tanaman • Merubah pot dan memangkas tanaman 	15 peserta 10 kali pertemuan
		Mebuat surat kabar (news paper) yang diterbitkan Kominkan bersama masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan tulisan (ceritera, berita dll oleh masyarakat) • Menyeleksi naskah tulisan oleh kelompok masyarakat tertentu • Menerbitkan • Membagikan surat kabar secara gratis ke tiap daerah (block) 	Semua kelompok masyarakat (asosiasi) berpartisipasi dalam kegiatan ini
7	Yaehara Kominkan	Keterampilan membuat keramik	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan keramik • Mendesain model keramik yang akan dibuat • Peroses pembuatan keramik yang benar • Pinishing dan pembakaran 	15 peserta 10 kali pertemuan
		Merangkai bungan untuk pesta	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan • Mendesain • Tahapan proses pembuatan • Keindahan dan merawat 	10 peserta 5 kali pertemuan
		Mari bermain tenis meja yang benar dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar bermain tenis meja yang benar • Menyiapkan peralatan • Bermain secara sportif • Cara pemanasan sebelum bermain 	15 peserta 10 kali pertemuan

Sumber: Hasil observasi dan laporan hasil penelitian dan laporan kegiatan Kominkan (2006)

Untuk mendukung kelancaran program kegiatan, Kominkan memiliki fasilitas khusus, baik tempat kegiatan maupun alat-alat bantu yang dibutuhkan atau sumber-sumber belajar berupa buku bacaan, modul dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan. Disamping itu pula disiapkan alat bantu pembelajaran seperti: OHV, komputer, LCD, film slide, film pembelajaran, alat-alat olah raga (senam), televisi, alat-alat memasak, alat-alat keterampilan membuat keramik, alat-alat pertanian, video tape, speaker, pemancar radio, juga alat-alat lain yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran kegiatan.

Berikut ini digambarkan jenis fasilitas yang dimiliki Kominkan dalam melancarkan berbagai kegiatannya.

Tabel 2.6.

Jenis Fasilitas yang dimiliki Kominkan

No.	Equipment	Percentage (%)
1	Japanese style room	15.3
2	Conference room	15.3
3	Training room	4.5
4	Audio visual room	3.6
5	Cookery	14.4
6	Library	11.7
7	Room for child	1.8
8	Room for exhibition	0.9
9	Saloon	1.8
10	Hall	8.1
11	Music Hall	6.3
12	Tea house	7.2
13	Workshop	2.7
14	Multipurpose room	2.7
15	Study room	1.8
16	Swimming pool	0.9
17	Recording room	0.9

Resources: Facilities for social education/Community and Adult education in Tsukuba, Kimitsu, and Urayasu (2006).

7. Melaksanakan (merealisasikan) program

Sepertihalnya kegiatan-kegiatan dalam organisasi lainnya realisasi atau pelaksanaan program merupakan kegiatan inti dari sebuah manajemen organisasi. Mekanisme yang dibangun dalam realisasi program biasanya melibatkan atau dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor teknis maupun nonteknis. Faktor yang paling penting harus terlibat dalam realisasi program atau pelaksanaan kegiatan di antaranya adalah: tutor (pelatih, fasilitator, pembicara) yang dapat dianggap sebagai tokoh kunci pertama. Tokoh kunci berikutnya adalah warga belajar atau sasaran didik (kelompok sasaran). Kedua hal ini merupakan faktor-faktor yang membuat program bisa berjalan dengan berhasil atau tidak. Tanpa salah satu saja kegiatan tidak akan terealisasi. Faktor teknis lainnya adalah kegiatan pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran. Kegiatan dan pengelolaan pembelajaran merupakan basis dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal, komponen yang terkandung di dalamnya meliputi; rencana pembelajaran, materi pembelajaran yang akan diberikan, media pembelajaran, metoda pembelajaran, alat atau evaluasi pembelajaran, serta daya dukung lingkungan pembelajaran. Kemampuan pengelolaan pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya tutor (pelatih). Sedangkan faktor nonteknis bisa berupa faktor psikologis seperti minat dan motivasi peserta didik (warga belajar), minat dan motivasi tutor, lingkungan sosial masyarakat, cuaca/iklim (di Jepang merupakan faktor yang selalu harus menjadi perhatian meskipun dianggap sebagai faktor nonteknis).

Untuk mewujudkan terintegrasinya faktor-faktor tersebut Kominkan melakukan beberapa strategi:

- Strategi pertama adalah menetapkan atau menganalisis kualitas tutor (pelatih). Kualitas tutor dilihat dari berbagai segi di antaranya adalah; a) latar belakang pendidikan dan pengalaman khususnya pengalaman di bidang pendidikan nonformal atau pendidikan sosial, b) disiplin berdedikasi dan bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengembangan program, c) kemampuan dan keterampilan tutor dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bernuansa pendidikan nonformal (pendidikan sosia), d) inovatif dalam mengembangkan model-model pembelajaran, e) memahami karakteristik sasaran didik dengan sebaik-baiknya, f) siap bekerja sesuai kontrak yang telah di sepakati.
- Strategi kedua adalah menyiapkan suasana lingkungan pembelajaran yang nyaman dan didukung fasilitas memadai, sehingga tutor, dan warga belajar betah menyelenggarakan pembelajaran.
- Strategi ketiga menyiapkan materi pembelajaran dengan jadwal yang disepakati sesuai dengan kebutuhan warga belajar (sasaran didik)
- Strategi keempat melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan selalu tepat waktu. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan sangat menyenangkan dan disepakati oleh warga belajar serta tutor.
- Menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, tutor, warga belajar dan materi pembelajaran.
- Warga belajar selalu mendapatkan perhatian penuh dari pihak Kominkan di antaranya adalah: penyediaan ruang makan, kantin, ruang diskusi, taman untuk bersantai, laboratorium, alat-alat kesenian, pelayanan kesehatan, perpustakaan yang lengkap dan sistem informasi yang berbasis komputer.

8. Melakukan pembinaan

Pembinaan yang dilakukan Kominkan meliputi empat fungsi kegiatan yakni: supervisi, pengawasan, monitoring dan evaluasi, fungsi pembinaan merupakan salah satu unsur yang perlu dalam mengelola kegiatan-kegiatan yang dikembangkan organisasi Kominkan, pembinaan merupakan langkah keempat dalam manajemen pendidikan, setelah perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Di dalam manajemen pendidikan, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Secara lebih tajam dan luas, pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur-unsur seperti: peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material) berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. (Djudju Sudjana, 1992)

Pembinaan kegiatan Kominkan meliputi dua kegiatan besar yakni pengawasan (*controlling*) dan supervisi (*supervising*), pengawasan dan supervisi merupakan unsur yang harus selalu menjadi dasar dalam segala kegiatan yang dikembangkan Kominkan. Terutama dalam mengendalikan jalannya proses pengelolaan kegiatan program. Tanpa kedua alat tersebut pengelolaan kegiatan sulit untuk dikembangkan dan digulirkan. Seperti diketahui antara supervisi dan pengawasan, adalah merupakan kedua unsur yang satu sama lain sulit untuk dipisahkan, dan keduanya saling isi mengisi atau saling melengkapi.

Mengacu pada dua kegiatan Kominkan, maka Kominkan dalam melakukan pembinaan harus memahami betul kondisi yang diawasi dan yang disupervisi. Disamping itu pula penyusunan program atau penyusunan instrumen supervisi dan pengawasan selalu menjadi acuan, dan patokan utama. Acuan dan patokan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu akan mampu membedakan tugasnya. Apakah instrumen tersebut untuk pengawasan atau untuk supervisi. Sehingga dalam pengambilan keputusan akan semakin jelas kebijakan apa yang akan diambil. Disamping itu pula prinsip demokratis selalu diterapkan oleh penyelenggara Kominkan dalam melaksanakan supervisi dan pengawasan. Prinsip demokratis yang diterapkan dalam supervisi dan pengawasan akan berdampak positif bagi perilaku yang ditunjukkan oleh warga belajar, tutor, fasilitator yang diawasi atau disupervisi. Sehingga perilaku yang ditimbulkan tidak dibuat-buat atau merasa terpaksa. Dalam pengelolaan program Kominkan pengawasan mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi manajemen lainnya.

Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan penyelenggara Kominkan dalam pengembangan program-programnya, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut; a) menetapkan tolok ukur mengenai hasil pencapaian tujuan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang akan dikembangkan, b) mengukur penampilan pelaksana program di lapangan, terutama dalam melakukan kegiatan, c) membandingkan penampilan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan, d) memperbaiki kegiatan, apabila dipandang perlu, sehingga kegiatan dan penyelenggaraan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fungsi lain dari pembinaan dalam pengelolaan program Kominkan adalah supervisi. Supervisi titik beratnya lebih menekankan penyelenggaraan program yang berhubungan dengan proses atau berjalannya program. Sehingga peran pengelola lebih tampak pada bagian ini dibandingkan pada bagian pengawasan, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pemahaman tentang pengawasanpun harus dimiliki oleh pengelola secara lebih baik dalam arti kemampuan teoritik dan praktek (aplikasi). Komponen-komponen yang disupervisi oleh pengelola Kominkan dalam pelaksanaan program adalah tutor, sumber belajar, dan fasilitator. Karena dalam hal ini pengelola Kominkan sebagai supervisor memiliki status lebih tinggi dari tutor, fasilitator, dan sumber belajar (pihak yang disupervisi). Status tersebut dapat dilihat dari wewenang, jabatan, pengalaman maupun keahlian serta sifat kepribadiannya. (Djudju Sudjana, 1992: 167).

Fungsi supervisi dalam pembinaan program Kominkan sangat berkaitan dengan pengamatan dan pemberi bantuan. Pengamatan biasanya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan objektif, tentang pelaksanaan program. Sedangkan pemberian bantuan bertujuan agar pihak yang disupervisi dapat memperbaiki kegiatan dan komponen-komponen program yang tidak sesuai, serta agar para pelaksana program dapat meningkatkan kegiatan yang telah dianggap baik.

Monitoring pada umumnya dilakukan baik pada waktu sebelum kegiatan pembinaan maupun bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan (pengawasan atau supervisi). Monitoring, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap

orang-orang yang mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program. Monitoring, selain berkaitan dengan pengawasan dan supervisi, mempunyai hubungan erat dengan penilaian program. Monitoring dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus menerus dengan cara mendengar, melihat dan mengamati, dan mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut (BPM, 1979: 1). Pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program Kominkan yang mencakup masukan sarana, masukan mentah, masukan lingkungan, masukan lain, proses pembelajaran, keluaran, dan dampak program.

Delapan aspek program Kominkan yang dimonitor meliputi: (a) lingkungan program mencakup organisasi atau lembaga pengelola program, partisipasi aktif dari masyarakat, hubungan Kominkan dengan asosiasi masyarakat, hubungan Kominkan dengan lembaga pendidikan formal (sekolah), dan dukungan tenaga profesional; (b) jumlah biaya dan pentahapan penggunaannya; (c) warga belajar yang mencakup jumlah dan komposisi warga belajar, keikutsertaan warga belajar dari kelompok status sosial-ekonomi paling rendah, kehadiran peserta dalam kegiatan pembelajaran, peserta yang mengulang kegiatan, peserta yang mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, waktu penyelesaian kegiatan pembelajaran, dan hasil test (apabila ada); (d) pendidik yang mencakup jumlah, cara rekrutmen, tingkat pendidikan, pengalaman, penggolongan (sukarela atau honorer, dari masyarakat

setempat atau dari daerah luar), kehadiran dalam kegiatan pembelajaran, dan partisipasinya dalam kegiatan masyarakat; (e) bahan pembelajaran yang mencakup jenis dan jumlahnya, ruang lingkup dan urutannya, yang tersedia dan akan disediakan; (f) proses pembelajaran yang mencakup jumlah pelajaran, strategi dan metode pembelajaran, dan kesan umum terhadap kegiatan belajar-membelajarkan; (g) fasilitas dan alat yang mencakup jumlah dan besarnya ruangan, ventilasi/penerangan, ketepatan bahan belajar dengan waktu penggunaannya, dan ketersediaan alat-alat pelajaran; (h) kesesuaian dengan informasi dari media-massa seperti sejauhmana dukungan siaran radio, televisi, dan surat kabar terhadap program yang sedang berjalan; (i) lulusan yang mencakup prosentase lulusan yang berhasil menamatkan program, persentase lulusan yang ingin menjadi calon peserta program baru, prosentase lulusan yang menerapkan hasil belajarnya, prosentase lulusan yang membelajarkan orang lain, dan masukan lain yang mendukung penerapan hasil belajar oleh lulusan. Dengan perkataan lain sasaran yang dimonitor itu meliputi sumber manusiawi, sumber non-manusiawi, lingkungan, proses, hasil, masukan lain, dan pengaruh program.

Pihak yang menyelenggarakan monitoring program Kominkan adalah pengelola program serta tim khusus (tenaga profesional) yang diberi tugas untuk memonitor pelaksanaan program atau dikenal dengan supervisor. Hasil monitoring digunakan untuk meluruskan serta memperbaiki program. Data hasil monitoring dilakukan pengelola Kominkan untuk memperbaiki program serta pengembangan program ke depan. Daftar model hasil monitoring kegiatan Kominkan digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Contoh Tabel Monitoring Kominkan

No.	Variabel yang dimonitor	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Jumlah
		4	3	2	1	
1	Lingkungan program :					
a	Partisipasi aktif pengelola program					
b	Partisipasi aktif dari masyarakat					
c	Hubungan Kominkan dengan badan-badan pembangunan masyarakat (assosiasi)					
d	Hubungan Kominkan dengan lembaga pendidikan sekolah (PTA/Parents Teacher Association)					
e	Dukungan tenaga profesional;					
2	Biaya dan efektifitas penggunaannya					
a	Pentahapan penggunaan					
b	Kontrol keuangan					
c	Efektifitas penggunaan					
3	Kondisi sasaran					
a	Jumlah dan omposisi sasaran,					
b	Data sasaran dari kelompok status sosial-ekonomi					
c	Kehadiran sasaran dalam kegiatan Kominkan					
d	Waktu penyelesaian kegiatan pembelajaran					
e	Hasil penilaian dan administrasinya					
4	Tutor atau sumber belajar					
a	Jumlah tenaga dan kesesuaiannya					

No.	Variabel yang dimonitor	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Jumlah
		4	3	2	1	
b	Cara rekrutmen tenaga					
c	Pengalaman dan Pendidikan					
d	Penggolongan (sukarela atau honorer)					
e	Kehadiran dalam kegiatan					
f	Partisipasinya dalam kegiatan masyarakat					
5 Fasilitas yang digunakan						
a	Fasilitas dan alat yang mencakup ventilasi/penerangan					
b	Jumlah dan besarnya ruangan,					
c	Ketepatan bahan belajar dengan waktu penggunaannya					
d	Ketersediaan alat-alat pendukung kegiatan					
6 Bahan dan proses kegiatan (pembelajaran)						
a	Jenis dan jumlahnya					
b	Ruang lingkup dan urutannya					
c	Jumlah kegiatan/pelatihan					
d	Strategi dan metode kegiatan					
e	Kesan umum terhadap kegiatan, belajar-membelajarkan;					
7 Kesesuaian dengan informasi dari media-massa						
a	Dukungan siaran radio, televisi dan Internet					
b	Surat kabar dan media cetak lainnya					
c	Informasi lewat Internet					

Sumber: disarikan dari beberapa laporan Kominkan (2006)

Hasil dari laporan tersebut dibuat dalam tabel khusus sehingga tergambar kualitas dari masing-masing variabel yang dimonitor. Kualitas hasil monitoring dapat

dilihat dari sejumlah angka hasil penilai dari masing-masing variabel, di mana masing-masing komponen disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Kominkan).

Fungsi pembinaan lainnya dalam Kominkan adalah penilaian (*evaluating*). Penilaian merupakan fungsi komponen khusus dalam pengelolaan pendidikan nonformal maupun dalam pengelolaan Kominkan. Penilaian dilakukan terhadap seluruh atau sebagian komponen pelaksanaan program Kominkan. Penilaian program Kominkan memiliki kriteria tersendiri ada penilaian yang diselenggarakan secara terus menerus, berkala, dan sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang, atau setelah suatu program dilaksanakan. Penyelenggaraan penilaian tersebut sangat bergantung kepada kebutuhan program, setiap program memiliki kriteria penilaian tersendiri serta disesuaikan dengan jenis program yang dikembangkan.

Penilaian merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan/atau dampak apa yang terjadi setelah suatu program dilaksanakan. Penilaian mempunyai kaitan erat dengan fungsi organik lainnya dalam pengelolaan Kominkan. Kaitan antara penilaian dengan perencanaan (*planning*) biasanya akan tampak dari perencanaan, karena perencanaan disusun berdasarkan hasil penilaian atau sekurang-kurangnya didasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan, permasalahan, dan sumber-sumber yang tersedia atau yang dapat disediakan.

Rencana dinilai untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kaitan antara penilaian dengan pengorganisasian (*organizing*) ialah bahwa penilaian

ditujukan untuk mengetahui apakah organisasi telah memenuhi prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat dan apakah sumber-sumber yang tersedia telah dipadukan dengan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana. Kaitan antara penilaian dengan penggerak (*motivating*) adalah bahwa penilaian dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya disiplin dan moral kerja pelaksana serta untuk mengetahui cara-cara motivasi yang tepat dalam mengembangkan loyalitas, partisipasi, hubungan kemanusiaan, efisiensi dan efektivitas kerja. Kaitan antara penilaian dengan pembinaan (*conforming*) ialah bahwa penilaian diarahkan untuk memelihara, memperbaiki, dan mengendalikan program atau kegiatan sesuai dengan program atau kegiatan yang seharusnya terjadi sebagaimana telah direncanakan. Kaitan penilaian dengan pengembangan (*developing*) adalah bahwa penilaian itu diarahkan untuk mengikuti program dan menentukan tindak lanjutnya. Di samping itu penilaian-pun dilakukan untuk memantau lingkungan guna dijadikan masukan dalam menentukan kegiatan selanjutnya.

Mengacu pada keterkaitan tersebut, penilaian memiliki kaitan fungsional dengan fungsi-fungsi lainnya dalam pengelolaan program Kominkan yaitu perencanaan program, pengorganisasian program, penggerak program, pembinaan program, maupun pengembangan program. Dalam kegiatan Kominkan tujuan penilaian berfungsi sebagai pengarah kegiatan dan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan. Tujuan penilaian pada umumnya mengacu pada upaya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (*decision making*). Anderson (1978)

9. Pengembangan program dan keberlanjutan program

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan program Kominkan adalah pengembangan program, pengembangan program Kominkan sangat berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan program yang telah dilakukan, terutama ditunjukkan oleh tingkat partisipasi peserta didik (warga belajar) serta tingkat kepuasan peserta (warga belajar) dalam mengikuti program. Beberapa langkah yang dilakukan Kominkan dalam pengembangan program, meliputi:

- a. Mengkaji ulang kualitas keberhasilan program yang telah berjalan
- b. Melakukan berbagai inovasi dengan cara mengembangkan model penyelenggaraan program yang lebih inovatif terutama dalam pembelajaran.
- c. Sosialisasi program lebih intensif melalui berbagai media.
- d. Melakukan pendekatan kepada organisasi dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan program Kominkan.
- e. Menyusun laporan kegiatan yang lebih terbuka dan akuntable.

Langkah-langkah tersebut selama ini dilakukan secara variatif dan disesuaikan dengan kebutuhan Kominkan. Di samping langkah-langkah tersebut Kominkan juga mengembangkan berbagai model kegiatan (program) dan berbagai model pendekatan pembelajaran dengan tujuan agar program lebih menarik dan diminati masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan sasaran.

I. Partisipasi masyarakat dalam program Kominkan

Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal atau pendidikan social (*sosial education*). Hal tersebut sejalan dengan karakteristik dan konsep pendidikan nonformal dan pendidikan sosial. Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui berbagai bentuk: ada partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran (ide dan gagasan), juga partisipasi dalam bentuk keuangan/materi. Dalam konsep pendidikan sosial partisipasi masyarakat bukan hanya ditunjukkan oleh daya dukung terhadap pengembangan program akan tetapi yang utama adalah partisipasi dalam mengikuti kegiatan. Tanpa partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Kominkan, maka Kominkan sebagai fasilitas pendidikan sosial yang dibangun pemerintah kota maupun yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat tidak akan berfungsi maksimal.

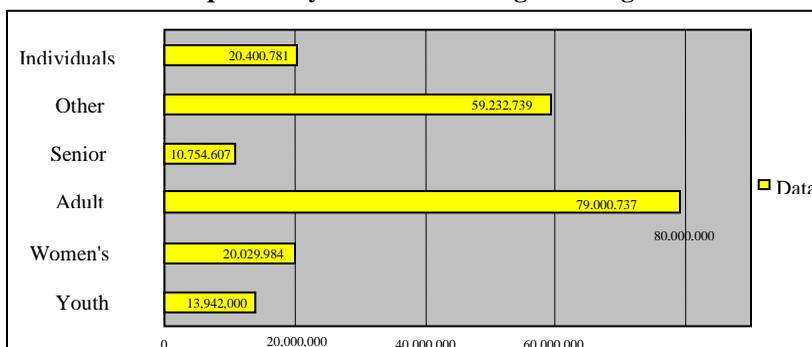
Dengan langkah-langkah yang ditempuh program yang dikembangkan Kominkan selalu mendapat respon yang sangat positif baik dari masyarakat maupun pemerintah kota, kadangkala program yang dikembangkan Kominkan bekerjasama dengan fasilitas pendidikan sosial lainnya seperti: museum, perpustakaan, pusat pengembangan pemuda, pusat pengembangan wanita, pusat pengembangan masyarakat (*community center*) maupun kerjasama dengan pendidikan formal (Sekolah) atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kegiatan sejenis atau di bawah naungan pendidikan sosial.

Berbagai program yang selama ini telah dikembangkan Kominkan, baik yang berbasis masyarakat maupun yang berbasis kelompok atau individual, dianggap cocok karena program yang dikembangkan tidak pernah sepi dari peserta. Ini berarti, bahwa program-program yang dikembangkan sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan sasaran serta aktual dengan kehidupan masyarakat Jepang saat ini. Keberhasilan Kominkan dalam mengungkap program merupakan suatu bukti bahwa pendekatan, strategi serta model yang dikembangkan sudah cukup berhasil atau sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan.

Data tentang partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan Kominkan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan-kegiatan Kominkan



Sumber: National Kominkan Association, (2006)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa perbandingan jumlah kelompok orang dewasa yang mengikuti kegiatan Kominkan jauh melebihi kelompok-kelompok lainnya terutama kelompok-kelompok pemuda dan perorangan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa program-program yang dikembangkan Kominkan diarahkan pada *self-development* masyarakat atau *self actualization*. Hal yang paling menarik dari data tersebut adalah tentang penyebaran program kegiatan, kondisi itu tampak dari sasaran program kegiatan yang bervariasi mulai dari anak-anak, pemuda, kaum perempuan, sampai pada orang tua. Ini menandakan bahwa Kominkan tidak pernah sepi dari aktivitas (kegiatan) dan mendapat respon positif dari semua komponen masyarakat.

Berikut ini digambarkan terintegrasinya program-program yang dikembangkan Kominkan, atau dalam hal ini fungsi Kominkan sebagai sebuah resource system dalam sebuah proses pembangunan masyarakat sehingga aspek-aspek pembangunan masyarakat yang melingkupi di dalamnya terintegrasi dalam pengembangan program yang dibutuhkan oleh seluruh komponen atau lapisan masyarakat.

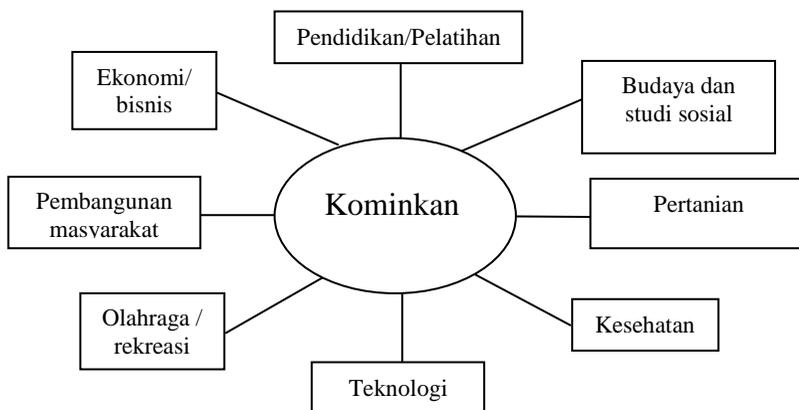


Diagram 2.5 Kominkan sebagai pusat belajar masyarakat

J. Masa Depan Kominkan

Setelah menjalani fungsinya selama setengah abad, fungsi dan peranan Kominkan mulai bergeser dari yang sifatnya bernuansa pembangunan politik dan sosial masyarakat Jepang kepada suatu kebutuhan sosial yang lebih spesifik. Hal ini juga disebabkan terjadi perubahan sifat pembangunan dan struktur sosial di dalam masyarakat sendiri, khususnya di dalam keluarga. Saat ini Jepang sebagai negara industri yang maju menyebabkan juga perubahan di dalam aktifitas masyarakat. Struktur masyarakat yang sebelumnya menganut

keluarga besar (extended family), saat ini berubah lebih didominasi oleh sistem keluarga kecil yang lebih individualistik.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah mulai dikurangnya budget dari pemerintah pusat di dalam pengelolaan Kominkan. Saat ini Kominkan (pemerintah) lebih bergantung kepada pemerintah lokal/municipal, karena sifatnya yang juga sangat terkait dengan lokalitas yang ada, baik daerah Urban maupun Rural. Pada saat ini Kominkan lebih banyak menitikberatkan kegiatannya untuk memberikan aktifitas pada Orang Tua/pensiunan, Ibu dan Anak serta untuk kegiatan anak-anak sesudah sekolah. Saat ini terjadi erosi hubungan antara aktifitas Rural dan Urban, juga khususnya antara pemuda dan orang tuanya. Ada pepatah di masyarakat Jepang yang mengatakan: "When an Oldman died, the library is burned down" atau ketika orang tua mati, pengalamannya tidak lagi bisa ditularkan. Motivasi aktifitas di masyarakat sangat berbeda dengan saat-saat awal berdirinya Kominkan.

Dengan dasar tersebut Pemerintah Jepang merasa perlu untuk mengadakan revitalisasi dan re"design" fungsi dan peranan Kominkan untuk masyarakat Jepang. Bagaimana kedepan Kominkan bisa dimanfaatkan lebih baik untuk kepentingan nasional (best used). Bisa saja Kominkan harus dilaksanakan juga dengan sifat volunterisme namun oleh suatu NGOs ataupun NPOs. Untuk itulah Komite Nasional Penelitian Kominkan (NIER) didirikan di dalam naungan MEXT(Kementrian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Jepang memerlukan gagasan-gagasan untuk merevitalisasi Kominkan. Dulu Kominkan dengan semangatnya berhasil memberikan dukungan percepatan pembangunan kembali Jepang pasca perang. Usaha ini ingin dilakukan melalui internasionalisasi Kominkan-khususnya di negara-negara ASEAN, agar bisa didapat masukan-masukan

dari negara lainnya yang dapat dimanfaatkan bagi keinginan diatas, disamping negara lain juga bisa belajar dari pengalaman panjang Jepang akan fungsi dan peranan Kominkan dimasa lalu.

Bagian III

Hasil Perjalanan ke Kominkan

A. Kunjungan pada Urayasu-Chuo Kominkan, Narashino City dan Seibu Kominkan, Funabashi City di Tokyo

1. Kedua Kominkan ini merupakan Municipal Kominkan (didirikan oleh pemerintah lokal Narashino dan Funabashi city). Kominkan di kedua kota tersebut berjumlah sebanyak jumlah sub distrik dengan skala aktifitas yang berbeda. Setiap kominkan baik yang didirikan pemerintah daerah maupun betul-betul atas inisiatif penduduk lokal betul-betul sifatnya untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat, baik yang bersifat sosial maupun bersifat pendidikan umum. Kebutuhan ini diekspresikan sebagai program-program yang dirancang oleh komite Kominkan daerah tersebut.



Urayasu-Chuo Kominkan, Narashino City



Seibu Kominkan, Funabashi City

Sumber: Koleksi Pribadi

2. Di Chiba Prefecture terdapat 56 Municipalities/pemerintah kota/rural yang terbagi atas 10 Cluster dan terdapat sebanyak 303 Kominkan. Di dalam Kominkan terdapat 5 Komite untuk kegiatan-kegiatan: Pelatihan Masyarakat, Hubungan kemasyarakatan, Penelitian, Staf dan ketua komite/Direktur. Untuk direktur Kominkan pemerintah ditentukan oleh “Board of Education”. Secara rutin diadakan pendidikan/pelatihan para direktur/pimpinan Kominkan se Provinsi. Para tutor berasal dari Universitas dan kebanyakan pelatihan diarahkan untuk mengembangkan pendidikan sepanjang hayat (life learning society). Pemberitaan kegiatan dilakukan melalui “news letter” yang disebarakan kemasyarakat, melalui sekolah dan “website”.
3. Program kegiatan Kominkan tidak pernah terstandardisasi. Penilaian keberhasilan suatu program dilakukan melalui evaluasi oleh Komite pengarah atau Board of education dari pemerintah kota dengan melihat nilai kepuasan peserta kegiatan bentuk apresiasi dari masyarakat serta jumlah peserta.
4. Secara geografis Kominkan ini tersebar dan berada dekat dengan Sekolah Dasar dan Menengah. Hal ini disebabkan akan akan kebutuhan tempat dan juga sebagai bentuk komplementer ketersediaan fasilitas umum di dalam keadaan darurat. Sebagaimana di ketahui bahwa setiap sekolah dasar dan menengah di Jepang juga dipersiapkan di dalam rancangannya sebagai tempat evakuasi bila ada keadaan darurat, misalnya akibat Gempa ataupun Angin Ribut maupun Banjir.
5. Sebagai Kominkan milik pemerintah lokal, disini

tersedia fasilitas yang terbuka untuk semua aktifitas yang terorganisir dan diminati masyarakat. Syarat yang paling penting adalah bahwa aktifitas tersebut terbuka untuk seluruh anggota masyarakat dan tidak untuk kepentingan satu agama ataupun untuk kepentingan politik dan tidak membebani masyarakat dengan pendanaan yang tidak sukarela (non-profit). Pemakaian fasilitas di Municipal Kominkan ini adalah gratis, tidak dipungut biaya, selama persyaratan kegiatan Kominkan dipenuhi. Untuk honor ataupun gaji staf kominkan milik pemerintah ditanggung oleh pemerintah lokal. Untuk Autonomous Kominkan honor dan gaji staf tidak dianggarkan secara khusus karena sifat volunterisme atau hanya bersifat sukarela dari anggota Kominkan.



Ruang serbaguna untuk "circle" - Ibu dan anak



Ruang Perpustakaan dan Ruang Baca Publik



Ruang Dapur



Ruang "Life Skill"



Ruang Auditorium budaya



Ruang Pamer "Life Skill"

Sumber: Koleksi Pribadi

6. Umumnya untuk kegiatan yang sifatnya pendidikan umum dan khusus, para tutor diambil dari tenaga Industri, para profesional termasuk budayawan, Pengajar di Universitas. Sedangkan pada Kominkan otonom, para pengajar para tutor banyak juga berasal dari warga sendiri khususnya para pemuka masyarakat. Pada kegiatan pelatihan tidak ada pemberian sertifikat pendidikan, karena istilah pelatihannya adalah "Just to make bread, not to make bakery"
7. Permasalahan umum yang mereka hadapi adalah bagaimana memberikan pelayanan bagi para pensiunan/orang-orang tua yang tidak punya aktifitas sama sekali serta tinggal sendiri dan juga aktifitas sebagai ibu rumah tangga yang baru mempunyai anak/anak-anak kecil dan tidak mempunyai aktifitas

lainnya. Hampir disemua Kominkan di Jepang keikutsertaan para kaum muda sangat rendah sekalipun tersedia aktifitas untuk mereka. Kaum muda lebih sibuk degan masalah sekolah atau perkuliahan mereka atau dengan pekerjaan mereka.

8. Kegiatan yang menonjol di kominkan adalah suatu bentuk kegiatan “Circle”, yaitu kegiatan terjadwal dari masyarakat yang berulang setiap minggu atau bulan secara teratur. Pertemuan ibu dan anak, pertemuan para ibu/bapak usia lanjut dan pertemuan dengan acara budaya-seperti memasak, olahraga dll adalah contoh kegiatan masyarakat ang berulang. Untuk bisa meminjam fasilitas Kominkan, masyarakat harus memesan setidaknya 3 bulan. Hal ini disebabkan banyaknya aktifitas sejenis oleh masyarakat.
9. Dalam hal Budget, sebuah kominkan milik pemerintah bisa mengeluarkan sekitar 695 juta Yen (Rp.86.875 Juta). Dari jumlah tersebut hanya sekita 6 Juta Yen yang digunakan untuk honorarium tutor, selebihnya 180. Juta Yen (25,9 %) digunakan untuk perawatan/updating fasilitas, 35 Juta Yen untuk Organisasi dansisanya untuk kebutuhan program kegiatan.
10. Keberadaan fasilitas dapur di semua kominkan pemerintah didasari konsepsi untuk menghadapi kondisi darurat yang timbul akibat gempa atau bencana lainnya. Dapur ini bisa berfungsi sebagai dapur umum dalam kondisi tersebut. Oleh karena dapur tersebut mempunyai ukuran yang besar dan dilengkapi dengan peralatan yang mutahir.
11. Di Seibu Kominkan kegiatan lebih banyak berbentuk: Seminar, Dansa, Kegiatan orang tua, Musik, Sejarah Modern dan lebih kurang 30 kegiatan *circles*. Di Jepang setiap tahun diselenggarakan Konferensi

Nasional Studi tentang Kominkan, yang mengusahakan pemberdayaan Kominkan kedepan (empowerment), mengembangkan fungsi-fungsi prinsip dan fungsi sosial Kominkan.

B. Pertemuan di Distrik Matsumoto (Nagano Ferfecture)

1. Di Perfecture Nagano setiap Sub Distrik atau kecamatan mempunyai organisasi sejenis Kominkan. Menurut Mr. Chujo, presiden asosiasi Kominkan Nagano, terdapat di 34 Distrikt sebanyak 464 Kominkan (37 Kominkan dipimpin oleh Perempuan), dimana hanya 439 organisasi yang tergabung di dalam keanggotaan Asosiasi Kominkan disini. Di setiap distrik terdapat Asosiasi Kominkan biasanya terdapat 1 City Kominkan dan 14 Kominkan otonom. Matsumoto sendiri merupakan sebuah distrik yang dikelilingi oleh pegunungan yang tertutup es di puncaknya, terdapat pada ketinggian 3000 Meter diatas permukaan laut.



Distrik Matsumoto, dikelilingi pegunungan

Sumber: Koleksi Pribadi

2. Di Distrik Matsumoto terdapat kelompok-kelompok Volunter yang dibina Kominkan, biasanya mempunyai

tujuan umum untuk “*social and environmental care*” , secara khusus terkait dengan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahaya Gempa; 2) Layanan Manula/”Age Care”; 3) Kesehatan; 4) Lingkungan Hidup; 5) Budaya Tradisional. Kelompok dini dibina berdasarkan motto yang diartikan sebagai berikut: *Seperti Salju diatas Payung, bila dilihat jumlah saljunya maka akan terasa berat, namun bila berfikir terhadap kesehatan dan payung tersebut alat milik kita, maka beban tersebut akan terasa ringan.*

3. Distrik Matsumoto merupakan daerah pertanian dengan hasil utama Beras dan Bunga Potong. Sebagai daerah pertanian, distrik ini utamanya dihuni kaum manula dan sangat sedikit meneria migrasi penduduk dari daerah lainnya. Selain itu distrik ini memiliki banyak peninggalan sejarah yang bermutu dan dapat dijadikan objek wisata. Sarana wisata lebih mengandalkan kepada suasana alami yag terdapat disana serta bercirikan hal-hal yang khas terkait dengan budaya Jepang.
4. Sebagaimana terdapat pada setiap distrik lainnya, di distrik Matsumoto juga terdapat suatu pelatihan para direktur untuk mengembangkan wawasan tentang apa saja yang bisa/mungkin dilakukan oleh Kominkan untuk anggota masyarakatnya.
5. Contoh Sebuah komunitas di Matsumoto yang terdiri dari 550 Keluarga- 1383 populasi, dengan kondisi dimana 30 KK tinggal di apartemen 4 lantai, 220 KK tinggal di apartemen pemerintah dan 250 KK hidup pada perumahan pribadi. Mereka terbagi dalam 32 group/Kominkan. Asosiasi masyarakat ini mempunyai kegiatan meliputi: Keselamatan lalulintas untuk anak-anak dan manula, Promosi kesehatan, Pelayanan Manula, Keadministrasian, Akuntansi, Sanitasi

kawasan dan mitigasi bencana. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang nyaman



Pertemuan dengan Otonom Kominkan di Matsumoto
Sumber: Koleksi Pribadi

6. Banyak Kominkan membangun fasilitasnya melalui penyediaan tanah oleh pemerintah kota, sedangkan fasilitas fisik di atasnya dibangun oleh dana dari masyarakat. Hal ini menjadikan rasa kepemilikan yang tinggi dari masyarakat. Pemanfaatan budget Distrik Kominkan dapat dibagi sebagai berikut: 40% untuk kegiatan, 20% donasi ke Kominkan Sub Distrik, 20% untuk perawatan dan pengembangan fasilitas dan 20% untuk donasi sosial, termasuk Allowance Leadership sebesar 3000 s/d 5000 Yen pertahun (karena sifatnya Volunteerisme)



Wajah 2 Bangunan Otonom Kominkan di Nimura

Sumber: Koleksi Pribadi

C. Asosiasi Sub Distrik Nimura Kominkan Autonom/Hamamatsu City

1. Disini khusus untuk pelayanan terhadap manula, terdapat perhimpunan pemuda volunteer yang secara teratur membantu para manula (mengirim Lunch Box) untuk mendapatkan kebutuhannya atau juga membantu mengikuti kegiatan tertentu. Mereka menyatakan, sistem keluarga besar yang ada di indonesia sebenarnya juga sangat diharapkan terjadi di Jepang, sehingga orang tua tidak kesepian dan terjamin kesejahterannya. Salah satu fungsi kominkan disini adalah untuk menumbuh kembangkan kembali bentuk “extended family ini dimasyarakat Jepang, misalnya melalui kegiatan budaya-olahraga yang melibatkan antar generasi.



Acara Cerita Bergambar untuk masyarakat;
tema cerita anak namun di hadiri Manula
Sumber: Koleksi Pribadi

2. Asosiasi disetiap distrik mempunyai publikasi bulanan (Lembaran Kuning masing-masing tentang kegiatannya. Publikasi ini masih ditambah 1 lembar dari setiap Kominkan anggotanya. Kegiatan utama pada Kominkan Otonom bermottokan: *People get together, learn together, to work and to be happy together*. Motto ini merupakan cerminan motivasi terbesar pada masyarakat untuk selalu belajar. Tidak ada bentuk instruksional dari pemerintah lokal ataupun oragnisasi. Semua kegiatan tumbuh dari pengertian dan sikap untuk saling membantu serta didukung bersama-sama oleh para volunter. Karena tidak adanya bentuk pembayaran/ataupun dukungan khusus disini, masyarakat bebas untuk menentukan arah kegiatannya sendiri.
3. Di dalam programnya Kominkan/masyarakat bisa mengajukan proposal untuk perbaikan wilayahnya kepada pemerintah lokal, karena mereka dianggap paling tahu permasalahan yang mereka hadapi. Umumnya masalah ini akan diselesaikan secara patungan oleh masyarakat disana sendiri. Bantuan

pemerintah bersifat subsidi untuk kegiatan tersebut. Sumbangan masyarakat untuk Kominkan mereka sebesar 1000 Yen (=Rp 1.250.000,-) setiap bulan. Tidak semua kegiatan Kominkan mengeluarkan dana, karena misalnya pada pertemuan setiap anggota membawa secara sukarela makanan kecil dan minuman. Pada acara Bazar malahan Kominkan bisa juga mengumpulkan pemasukan melalui jualan (tanaman, makanan). Masalah akuntabilitas kegiatan Kominkan merupakan hal yang penting dalam sustainabilitas/kelangsungan Kominkan tersebut

4. Mengingat daerah ini sering terjadi bencana (gempa, taifun dan banjir) maka program terkait dengan “*disaster preparedness*” menduduki ranking yang tertinggi di setiap Kominkan, terutama di dalam pertolongan pertama untuk manula yang merupakan prosentase terbesar di wilayah pertanian tersebut.

D. Pertemuan dengan Municipal Nimura Kominkan/City Kominkan

1. Di Matsumoto Sub Distrik Nimura (city Kominkan) mempunyai motto: “Let’s excavate the hidden treasure of Nimura and Let’s polish the Treasure”. City Kominkan ini teruama berfungsi sebagai “Social Welfare Centre, Khususnya para Manula dan Anak-anak. Di dalam menjalankan fungsinya City Kominkan ini berkejasama dengan Universitas Matsumoto. Kota ini mempunyai lambang yang disebut Mr.Taro, yang berdasarkan cerita rakyat merupakan seorang pemuda yang malas (lazy Boy) namun kemudian mau berusaha dan hidupnya menjadi serba berkecukupan.
2. Kegiatan mereka sebagaimana lainnya berlandaskan

Oleh, Untuk dan Dari Penduduk. Dengan 5 tujuanprogram: 1) Standar pelayanan yang baik; 2) Revisi kegiatan untuk peningkatan pelayanan; 3) Masyarakat sebagai pusat perhatian; 4) Mendengan kepada kebutuhan masyarakat dan 5) berinisiativ memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap isu di masyarakat akan didiskusikan oleh komite yang terdiri dari wakil Kominkan, Universitas dan Masyarakat. Ada keikutsertaan Universitas membuat banyak kegiatan yang bisa melibatkan anak remaja dan pemuda.

3. Komite di dalam city Kominkan ini terdiri dari: 1) Komite Perencanaan dan Evaluasi; 2) Komite Olahraga; 3) Komite Audio Visual; 4) Komite Perpustakaan dan 5) Komite Pemberitaan/Newsletter. Komite pertama adalah pintu untuk lolosnya suatu program yang diusulkan dari masyarakat. Dengan keberadaan Universitas, terdapat sejumlah 31 kelompok studi bernama “Lazy Association” yang setiap bulan melakukan seminar/tukar pendapat dengan anggota fakultas universitas dan staf Kominkan serta mahasiswa tergantung dengan interest yang berkembang.
4. Acara yang paling besar dari Kominkan di Nimura ini adalah Festival Musik & Budaya tahunan dimana seluruh masyarakat terlibat dalam aktifitas yang beragam serta adanya pameran akan hasil-hasil kegiatan “long Life learning” yang dilakukan sepanjang tahun tersebut.

E. Diskusi Delegasi dengan Komite Nasional Riset Kominkan

1. Diskusi ini merupakan ajang dengan pendapat, yang lebih merupakan presentasi oleh delegasi tentang CLCs/PKBM Indonesia serta pandangan delegasi Indonesia tentang Kominkan di Jepang. Anggota Komite ini terdiri dari:

Tabel.3.1 Tabel Kunjungan Delegasi dan Komite Nasional Riset Kominkan

1	KAWAKAMI Chiharu	Director, Education and Culture Division and Public Relations Division, National Federation of UNESCO Associations in JAPAN (NFUAJ)
2	SASAI Hiromi	Principal Researcher, National Institute for Educational Policy Research of Japan (NIER)
3	TAKAHASHI Kou	Professor, Aomori Chuo Gakuin University
4	TANI Kazuaki	Professor, Japanese Language Center for International Students, Tokyo University of Foreign Studies
5	TEUCHI Akitoshi	Professor, Graduate School of Comprehensive Human Sciences (Institute of Education), Chair of Institute of Education, University of Tsukuba
6	MASUKAWA Kouichi	Associate Professor, Information and Multimedia Center, Gifu University
7	MASUDA Tomoko	Visiting Senior Advisor, Japan International Cooperation

		Agency (JICA)
8	MURAKAMI Hideki	Deputy Secretary, National Kominkan Association

Ditambah dengan Secretariat Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU)

1	SUZUKI Yoshimori	Director, Programme Department
2	SHIBAO Tomoko	Director, Education Division
3	ZAHA Tamami	Programme Specialist, Education Division
4	TSUTSUI Sayaka	Programme Specialist, Education Division
5	MIYAGI-	Programme Specialist, Education Division



Diskusi dengan Komite Nasional Riset Kominkan/NIER
Sumber: Koleksi Pribadi

2. Didalam presentasi yang diberikan ketua Delegasi Ibu Ella Julaelawati PhD, disampaikan tentang permasalahan umum pendidikan di Indonesia, menyangkut kondisi geografi, infrastruktur pendidikan, kondisi ekonomi di masyarakat, keberadaan dan kondisi sekolah formal, kondisi masyarakat di daerah terpencil, perkembangan lembaga pendidikan non-formal dan juga usaha-usaha pemerintah dalam memajukan pendidikan-termasuk

usaha untuk mengembangkan institusi pendidikan non-formal-mulai dari pendanaan, pengembangan SDM, Sarana dan prasarana baik tetap maupun yang bergerak, mengembangkan sistem Blockgrant bagi institusi pendidikan non-formal seperti CLCs/PKBM. Istilah menjangkau yang tidak terjangkau menjadi sikap proaktif dari pemerintah untuk untuk memajukan SDN melalui pendidikan non-formal

3. Delegasi menambahkan akan kaitan kondisi geografis dengan perkembangan yang tidak seimbang disetiap provinsi/kabupaten. Perbedaan masalah yang dihadapi di Indonesia sangat berbeda dengan yang dihadapi dengan Jepang terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dasar di Indonesia lebih terkait dengan kondisi: 1) Pengentasan Kemiskinan; 2) Pendidika Dasar; 3) Keterampilan rendah SDM Buruh; 4) Pengangguran; 5) Buta Huruf; 6) PAUD; 7) Gender; 8) Kesehatan.
4. Dihadapkan kepada Globalisasi, maka fungsi CLCs di Indonesia tidak hanya sebagai sarana pendidikan masyarakat sebagaimana di Jepang tapi juga menjadi Jembatan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut diatas. Oleh karenanya di PKBM diberlakukan beberapa standar program untuk pencapaian mutu/tingkat keterampilan minimum yang harus dicapai peserta (hal ini terkait mengapa di Indonesia diberlakukan akreditasi untuk program kegiatan tertentu). Namun demikian kebanyakan PKBM masih mempunyai kekurangan dalam hal: 1) Tutor dan kualitasnya; 2) Fasilitas Pendidikan/Pelatihan; 3) Kemampuan Manajerial dan 4) Kemampuan Finansial.
5. Dari sudut pemerintah/Departemen Pendidikan Nasional telah tersedia juga sejenis “city Kominkan”

dinamakan SKB (480 institusi), pada tingkat distrik; BPKB pada tingkat Provinsi dan BPPNFI pada tingkat antar Distrik. Lembaga lembaga ini ikut membantu PKBM di dalam peningkatan kualitas pendidikan/pelatihan yang diprogramkan. Jadi PKBM di Indonesia berfungsi sebagai lembaga pendidika yang memberikan: 1) Life skill untuk kaum perempuan dan anak remaja dan pemuda; 2) Pelatihan berbasis kompetensi untuk bekerja; 3) Pemberantasan Buta Huruf; 4) PAUD; 5) program Kesetaraan SD,SMP,SMA dan 6) Aktifitas Kebudayaan.

6. Kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan PKBM melalui: 1) ToT > tutor PKBM; 2) Blockgrant untuk Program berdasarkan Proposal; 3) Grant untuk CLCs/ Forum PKBM; 4) Bantuan Finansial Peningkatan Tutor serta pembinaan dari SKB, BPKB ataupun BPPNFI.
7. Secara Finansial PKBM mendapatkan dana dari: 1) Sumbangan Masyarakat untuk aktifitas yang diikuti; 2) Subsidi Pemerintah, baik blockgrant maupun pelaksanaan program tertentu; 3) Donasi dari individu/Institusi; 4) Profit melalui unit bisnis yang dibuat.

F. “Lesson Learned” Kegiatan Kunjungan

Dari semua kejadian selama kunjungan di kedua Prefecture Tokyo dan Nagano beberapa hal yang diambil sebagai pokok penting untuk didiskusikan lebih lanjut dalam kaitan keberadaan PKBM di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Kominkan untuk menunjang pembangunan negara melalui kebersamaan, kecintaan terhadap negara melalui pembelajaran tentang

demokrasi kecintaan akan perdamaian telah terbukti sangat efektif dan efisien. Kominkan dalam hal ini menjadi jembatan dalam penyampaian ideologi dalam artian pembelajaran sosial kepada masyarakat untuk untuk membangun dalam perdamaian.

2. Didalam usaha menggalang masyarakat untuk menunjang kembali pembangunan pasca perang ataupun bencana peran pemerintah untuk membangun dan memperkuat lembaga Kominkan mempunyai nilai yang sangat penting. Lembaga Kominkan yang bisa berfungsi optimal merupakan bantuan yang besar dalam keberhasilan pembangunan fisik dan nonfisik negara. Bantuan pemerintah ini bisa berupa secara finansial, fisik (seperti pemberian lahan) atau nonfisik (pemberian pelatihan)
3. Kegiatan Kominkan yang berbasiskan masyarakat dan potensi fisik dan budaya lokal melalui merupakan kekuatan dan mudah diterima masyarakat dalam mensukseskan pembelajaran sepanjang hayat (long life learning), hal ini juga bisa dipakai sebagai usaha untuk memelihara struktur sosial masyarakat, seperti “extended family” yang bisa berguna dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum manula.
4. Di dalam kaitan pendidikan masyarakat yang peduli terhadap perkembangan lingkungan Kominkan bisa menjadi alat untuk kepedulian tersebut disamping juga untuk tujuan perdamaian.
5. Pembinaan kelompok-kelompok Volunter untuk tujuan pemberdayaan masyarakat oleh kominkan pemerintah merupakan hal penting dalam menghadapi berbagai kejadian yang tidak diharapkan, seperti kepedulian terhadap kaum manula, bahaya gempa dan bencana alam lainnya. Kelompok volunter yang

terbina ini merupakan kekuatan yang sangat positif di dalam masyarakat.

6. Persyaratan bahwa pemakai Sarana dan prasaran Kominkan tidak boleh berbasiskan agama, politik dan tujuan profit memberikan peluang kebersamaan dalam masyarakat serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Hal ini memberikan jaminan kesuksesan program pembelajaran sepanjang hayat.
7. Bahwa sebuah Kominkan sebenarnya merupakan “Cost Centre” adalah suatu yang wajar dan dapat diterima dalam kaitan pencapaian masyarakat sejahtera lahir dan batin. Hal ini juga bisa menjadi penghambat berkembangnya penyakit sosial yang bisa merugikan dan berdampak negatif terhadap pembangunan yang direncanakan.
8. Penyiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya gempa dan bencana lainnya melalui Kominkan yang tersebar diseluruh subdistrik merupakan hal yang sangat efektif dan efisien. Hal ini disamping memberikan kesiapan mental masyarakat, juga memudahkan usaha penanggulangan akan akibat bahaya yang datang. Pada akhirnya hal ini bisa menekan pembiayaan rekonstruksi (fisik dan sosial) pasca bencana
9. Keberadaan Lembaga Nasional Riset Kominkan merupakan strategi yang baik dalam memelihara dan mengembangkan Kominkan sebagai bagian dari sistem pendidikan masyarakat yang efektif dalam kesesuaiannya terhadap perkembangan zaman (perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik)

G. Saran Pengembangan Kerjasama Lanjut

1. Sosialisasi Sejarah Kominkan Paca Perang Dunia II oleh NIER
Sosialisasi ini bisa dilakukan dalam bentuk seminar terbuka dan terbatas untuk dapat mengambil esensi yang sebenarnya, bagaimana Jepang setelah mengalami kekalahan di dalam perang dunia II dengan cepat bisa bangkit kembali, terkait dengan keberadaan/fungsi Kominkan dan adanya Social Education Act tahun 1949. Seminar terbuka ditujukan untuk para organisasi kemasyarakatan serta pemerintah daerah/Kabupaten agar mereka bisa melihat dan mendapat manfaat akan kepentingan pendidikan sosial di dalam membangun wilayah/negara. Seminar terbatas dapat ditujukan kepada para pengambil keputusan di pusat dan akademisi terkait untuk bisa mendapat manfaat tentang pengembangan kebijakan terkait dengan masalah pendidikan sosial tersebut.
2. Magang di Kominkan Pemerintah Lokal dan Otonom.
Program magang pada Kominkan ini ditujukan kepada para pengelola PKBM dan SKB/BPKB untuk mendapatkan pegalaman manajerial tentang cara operasional kegiatan mereka, mujlai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengembangan program pendidikan sosial.
3. Magang tentang kesiapan terhadap bencana
Masalah bencana alam juga merupakan halyang serius untuk Indonesia. Untuk itu perlu sekali untuk mendapatkan cara pendidikan masyarakat guna

membangun kesiapan mental dan keterampilan untuk bersikap bila terjadi bahaya, seperti gempa dan lainnya. Magang ini ditujukan untuk para volunteer ataupun para pendidik yang terkait dengan pendidikan masyarakat. Program ini tentunya harus dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan untuk para pelaku pendidikan masyarakat di daerah, agar bisa disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya bagi yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.

4. Magang Peneliti pada NIAR/MEXT

Magang pada Komite Nasional Penelitian Kominkan ini ditujukan bagi para peneliti pendidikan, khususnya tentang organisasi kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa belajar bagaimana cara memanfaatkan organisasi kemasyarakatan untuk kegunaan yang positif guna mencapai sesuatu tujuan pembangunan. Dengan mengenal karakter organisasi kemasyarakatan, maka diharapkan para peneliti ini bisa memberikan masukan bagi pengambil kebijakan terkait dengan pengembangan dan bantuan yang bisa diberikan di dalam pendidikan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Allan, G. (1996) *Kinship and Friendship in Modern Britain*, London: Oxford University Press.
- Aso, M. & T. Hori. (1997). *Shogai gakushu shakai no kanosei to kadai* (The possibility and the problems of a lifelong learning society). In Aso, M. & Hori, T. (1997). *lifelong development and lifelong learning*. Tokyo: Nippon Hoso Publishing Association.
- Beck, U. (2001) '*Living your life in a runaway world: individualization, globalization and politics*', in W. Hutton and A. Giddens. (eds.) *On The Edge. Living with global capitalism*, London: Vintage.
- Bell, C. & Newby, H. (1971), *Community Studies*, London: Unwin.
- Boediono & Yulaelawati.E. (1999). *Designing Curriculum Based on Basic Competency: A Rational*. Education Journal, October, V1005, No. 019. Jakarta: Balitbang.
- Cohen, A. P. (1985) *The Symbolic Construction of Community*, London: Tavistock.
- Coombs, P. H. (1968) *World Educational Crisis: a systems approach*, New York: Oxford University Press.
- Coombs, P. with Ahmed, M. (1974) *Attacking Rural Poverty*, Baltimore: The John Hopkins University Press. How non-formal education can help, Baltimore: John Hopkins University Press.
- Coombs, P. (1985) *The World Crisis in Education*, New York: Oxford University Press.

- CRICED, (2006), *Educational system and practice in Japan*, CRICED, University of Tsukuba.
- Depdiknas. (2004). *Curriculum Framework and Program Structure*. Jakarta: Ministry of National Education.
- Depdiknas. (1999). *Law on Regional Autonomy Number 22, 1999*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fukuyama, F. (1999) *The Great Disruption. Human nature and the reconstitution of social order*, London: Profile Books.
- Illich, I. (1973) *De-Schooling Society*, Harmondsworth: Penguin.
- Jeffer, T. and Smith, M. K. (1996, 1999) *Informal Education: conversation, democracy and learning*, Ticknall:
- Kindervatter, S., (1979), *Pemberdayaan Masyarakat (Empowering Process)*.
- Keeble, R. (1981) *Community and Education. Some relationships and some issues*, Leicester:
- King, C. (1948) *Organization for Community Action*, New York: Harper.
- Labelle (1976:1881),
- Mayo, M. (1997) *Imagining Tomorrow: Community adult education for transformation*, Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.
- Mayo, M. (1975) 'Community development: a radical alternative?' in R. Bailey and M. Brake (eds.) *Radical Social Work*, London: Edward Arnold.
- Nagasawa, S. (2001). *Shakai kyoiku gainen no henshitsu to aratana kokka tosei: Shakai Kyoikuho ichibu kaiseian nado no hoteki shomondai* (The

transformation in the concept of social education and a new form of the state control: the legal problems of the partial revision of the Social Education Law). *Monthly Social Education*,45(5),64-67.

- National Forum Coordination Education For All, (2005), *National action plan education for all*, Ministry of National Education, Jakarta.
- Ogawa, T. (1987). *Shakai kyoiku no ho to gyosei* (Laws and administration of Social Education). Tokyo: Aki Shobo Press.
- Ogawa, T. (1991). *Gendai Shogai Kyoiku Dokuhon (The modern lifelong learning reader)*. Tokyo: Eidell Institute.
- Shimada, S. (1985). *Shakai kyoiku no jiyu to jichi* [Freedom and self-governance of Social Education]. Tokyo: Aoki Shoten Press.
- Sudjana, D. (2000), *Pendidikan Luar Sekolah, Sejarah*, Azas,
- Teuchi, A. (2006), *Japanese Social Education*, CRICED, University of Tsukuba.
- UNESCO (1972) *Learning to Be* (prepared by Faure, E. et al), Paris: UNESCO.
- UNESCO, (1993), *Continuing education: New policies and Directions*, UNESCO principal Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok.
- UNICEF, UNESCO, (2006), *Identifying and reaching the unreached*, education for all Asia and the Pacific.
- Yulaelawati, E. (2002). *Strategic Learning for Teaching Math and Science Based on Competency-Based*

Curriculum. (unpublished paper presented in Teacher College Jakarta).

Yulaelawati, E. (2002). *Competency-Based Curriculum in the Era of regional Autonomy*. Jakarta. (unpublished paper presented in Indonesian Educator Association in Jakarta).